



BAPPEDA
PROVINSI LAMPUNG



LAPORAN KINERJA



BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL



BHUMANDALA
AWARD 2024

PIAGAM PENGHARGAAN

SK Kepala BIG No. 167.1 Tahun 2024 tentang Penetapan Penerima Penghargaan Bhumandala Tahun 2024

Diberikan Kepada

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung

annya dalam rangka Penghargaan Bhumandala Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial

RAJATA

Semoga prestasinya dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Cibinong, 4 November 2024

Kepala Badan Informasi Geospasial



Prof. Dr. Ir. H. Rajat, M. Sc.

BAPPEDA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN
2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu.

Laporan Kinerja Bappeda Provinsi Lampung memuat capaian tujuan dan sasaran kinerja Bappeda Provinsi Lampung sepanjang tahun 2024. Penyusunan laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas akuntabilitas kinerja yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024 serta diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dan evaluasi dalam perencanaan dan pencapaian target di tahun mendatang.

Dokumen ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (stakeholder). Akhir kata, terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2024.

Plt. **KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH,**

Dr. ANANG RISGIYANTO, S.K.M., M.Kes.

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19750731 200003 1 002



RINGKASAN EKSEKUTIF

BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2024 melaksanakan 3 Program, 15 Kegiatan dan 57 Sub Kegiatan untuk mendukung target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja BAPPEDA. Berdasarkan APBD Perubahan Tahun 2024, total anggaran BAPPEDA Tahun 2024 sebesar Rp. 37.981.061.501, anggaran yang terserap sebesar 92,2% atau sebesar Rp. 35.027.072.585 dengan realisasi capaian kinerja 57 sub kegiatan seluruhnya 100%.

Analisa terhadap strategis BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2024, menunjukkan bahwa capaian pada 3 indikator masuk pada kategori SANGAT TINGGI. Realisasi capaian sasaran strategis BAPPEDA Provinsi Lampung tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :



Sasaran strategis **“Meningkatnya kualitas proses perencanaan dan pengukuran pembangunan daerah”** dengan capaian 3 indikatornya sebagai berikut :

1. **Indikator “Indeks Perencanaan Pembangunan”**, merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas proses perencanaan pembangunan di suatu daerah. Indeks ini mencerminkan sejauh mana perencanaan pembangunan dilakukan secara efektif, berbasis data, partisipatif, serta selaras dengan kebijakan nasional dan daerah. Sejak pertama kali dirilis pada Tahun 2023, capaian kinerja yang diraih oleh BAPPEDA Provinsi Lampung menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dari 81,01 dengan predikat “MEMUASKAN” pada tahun 2023 menjadi 93,94 dengan predikat “SANGAT MEMUASKAN” pada Tahun 2024 dengan capaian 114%. Realisasi Anggaran Indeks Perencanaan Pembangunan tercapai 100% dengan efisiensi anggaran sebesar 9,96% dengan capaian realisasi 90,04%. Dengan pagu Rp5,18 miliar dan realisasi

Rp4,48 miliar (90,04%), capaian ini menunjukkan efektivitas perencanaan pembangunan yang cukup baik. Target kinerja Indeks Perencanaan Pembangunan tahun 2024 sebesar 82 dapat terlampaui dengan realisasi 93,94 atau 114%. Dari sisi anggaran, pagu sebesar Rp5,18 miliar terealisasi Rp4,48 miliar atau 90,04%. Hal ini menunjukkan efektivitas kinerja yang tinggi dengan dukungan penggunaan anggaran yang cukup efisien.

- 2. Indikator “Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Provinsi”** merupakan salah satu komponen dalam penilaian SAKIP. Nilai Komponen Perencanaan pada Penilaian SAKIP Provinsi Lampung pada Tahun 2024 ditargetkan sebesar 22,45 dan realisasinya adalah 21,93 atau dengan persentase 97,6% (sangat tinggi). Dari hasil evaluasi terhadap komponen perencanaan dalam nilai SAKIP Provinsi Lampung Tahun 2024, Provinsi Lampung dinilai telah berhasil menyusun perencanaan kinerja yang baik. Serangkaian dokumen perencanaan kinerja yang telah dituntaskan mencakup rencana jangka menengah (Rencana Pembangunan Daerah 2025-2026) telah diturunkan oleh Perangkat Daerah dalam Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah 2025-2026), Rencana Kerja Tahunan dan dokumen dokumen lain, baik pada tingkat Pemda maupun PD dan unit kerja di bawahnya dengan kualitas yang baik. Realisasi Anggaran Komponen Perencanaan Kinerja pada SAKIP Provinsi tercapai 100% dengan efisiensi anggaran sebesar 12,88% dengan capaian realisasi 87,12%. Dari alokasi Rp5,17 miliar terealisasi Rp4,56 miliar (87,12%). Angka ini mencerminkan perencanaan yang akuntabel meskipun belum maksimal. Nilai komponen perencanaan ditargetkan 22,45 dengan realisasi 21,93 atau 97,60%. Anggaran sebesar Rp5,17 miliar terealisasi Rp4,56 miliar atau 87,12%. Meskipun capaian

kinerja hampir mendekati target penuh, efisiensi penggunaan anggaran tetap terjaga sehingga mendukung peningkatan kualitas perencanaan dalam SAKIP.

3. **Indikator “Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP Provinsi”** terdiri dari Keberadaan Pengukuran Kinerja, Kualitas/Mutu Pengukuran Kinerja, dan Pemanfaatan Pengukuran Kinerja. Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP Provinsi Lampung target realisasinya sebesar 19,05 dan realisasinya adalah 18,44 atau dengan persentase 96,7%. Realisasi Anggaran Komponen Pengukuran Kinerja pada SAKIP Provinsi tercapai 100% dengan efisiensi anggaran sebesar 21,78% dengan capaian 78,22%. Dengan pagu Rp1,13 miliar, realisasi Rp934 juta (76,60%). Capaian ini masih perlu diperkuat untuk memastikan pengukuran kinerja lebih optimal. Komponen pengukuran ditargetkan 19,05 dengan realisasi 18,44 atau 96,70%. Anggaran yang dialokasikan Rp1,13 miliar terealisasi Rp934 juta atau 78,22%. Meskipun capaian kinerja mendekati target, masih diperlukan penguatan dalam efektivitas pengelolaan anggaran untuk mendukung kualitas instrumen pengukuran kinerja.

Pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2024 tidak mengalami kendala yang berarti, hal ini memberikan impact terhadap tingginya capaian kinerja yang diraih BAPPEDA di Tahun 2024. Kendala hanya terjadi dalam aspek perencanaan dan pelaksanaan teknis operasional kegiatan dan dapat dikendalikan dengan baik sehingga tidak berdampak terhadap capaian kinerja.

Laporan Kinerja menjadi instrumen masukan bagi perbaikan kinerja Pemerintah Daerah tidak terkecuali BAPPEDA Provinsi Lampung, oleh karena itu hasil evaluasi capaian kinerja ini diharapkan bermanfaat sebagai dasar perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun yang akan datang.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
Bab I. Pendahuluan ...	1
1.1 Dasar Hukum.....	2
1.2 Tugas dan Fungsi	3
1.3 Struktur Organisasi.....	4
1.4 Sumber Daya Manusia.....	7
1.5 Sarana dan Prasarana.....	9
1.6 Sumber Pendanaan	13
1.7 Sistematika Laporan Kinerja.....	14
Bab II. Perencanaan Kinerja	16
2.1 Perubahan Renstra Bappeda 2019-2024.....	16
2.2 Perubahan Renja 2024	34
2.3 Perubahan PK 2024	38
2.4 Keselarasan Dokumen SAKIP	43
2.5 Dukungan Program Unggulan BAPPEDA terhadap IKU.....	46
Bab III. Akuntabilitas Kinerja	47
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja.....	47
3.2 IKU Tujuan dan Capaian IKU pada BAPPEDA Provinsi Lampung 2019-2024	48
3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja BAPPEDA Tahun 2024	52
3.4 Akuntabilitas Keuangan dan Realisasi Tahun 2024.....	87
3.5 Efisiensi dan Efektivitas	100
3.6 Refokusing Anggaran	109
3.7 Rekomendasi Terhadap Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat	113
3.8 Prestasi yang Diraih BAPPEDA Provinsi Lampung di Tahun 2024	116
Bab IV. Penutup	121
4.1 Kesimpulan	121
4.2 Rekomendasi hasil Evaluasi Program/Kegiatan.....	123





DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Jabatan Eselonisasi BAPPEDA Provinsi Lampung.....	17
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin.....	9
Tabel 1.3	Sarana dan Prasarana Pendukung di BAPPEDA	10
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator BAPPEDA 2019-2024.....	19
Tabel 2.2	Tabel Perubahan Renja IKU Baru Tahun 2024.....	35
Tabel 2.3	Tabel Perubahan Renja IKU Lama Tahun 2024.....	36
Tabel 2.4	Tabel Keselarasan Dokumen Perencanaan 2024.....	44
Tabel 2.5	Dukungan Program Unggulan Bappeda terhadap IKU.....	46
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	48
Tabel 3.2	Target dan Capaian IKU BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.....	49
Tabel 3.3	Target dan Capaian Perubahan IKU BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.....	51
Tabel 3.4	Capaian Indeks Perencanaan Pembangunan (2023-2024).....	54
Tabel 3.5	Capaian Indeks Perencanaan Pembangunan Provinsi Lampung dan Nasional (BAPPENAS) Tahun 2024.....	55
Tabel 3.6	Perbandingan Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Provinsi Lampung dengan Provinsi Regional Sumatera	60
Tabel 3.7	Faktor Pendukung dan Penghambat Tercapainya Indikator Indeks Perencanaan Pembangunan	61
Tabel 3.8	Capaian Nilai Komponen Perencanaan pada Penilaian SAKIP Provinsi Lampung (2023 2024)	64
Tabel 3.9	Capaian Nilai Komponen Perencanaan pada Penilaian SAKIP Provinsi Lampung dan Sumatera Barat (Provinsi Benchmark) Tahun 2024	66
Tabel 3.10	Nilai Komponen Perencanaan pada SAKIP OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Lampung (2023-2024).....	71
Tabel 3.11	Faktor Pendukung dan Penghambat Tercapainya Indikator Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP	73
Tabel 3.12	Nilai Komponen Pengukuran pada SAKIP OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Lampung (2023-2024).....	76





Tabel 3.13 Capaian Nilai Komponen Pengukuran pada Penilaian SAKIP Provinsi Lampung dan Sumatera Barat (Provinsi Benchmark) Tahun 2024	77
Tabel 3.14 Nilai Komponen Pengukuran pada SAKIP OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Lampung.....	78
Tabel 3.15 Faktor Pendukung dan Penghambat Tercapainya Indikator Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP	85
Tabel 3.16 Akuntabilitas Keuangan dan Realisasi Tahun 2024.....	88
Tabel 3.17 Target Kinerja, Target Capaian dan Realisasi Kinerja Tahun 2024....	89
Tabel 3.18 Realisasi Kinerja dan Anggaran BAPPEDA Tahun 2024	101
Tabel 3.19 Realisasi Kinerja dan Anggaran BAPPEDA Tahun 2024.....	102
Tabel 3.20 Refokusing Anggaran Sub Kegiatan BAPPEDA.....	109
Tabel 3.21 Tindak Lanjut LHE 2024.....	114
Tabel 3.22 Daftar Inovasi BAPPEDA Provinsi Lampung.....	119





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi BAPPEDA.....	6
Gambar 1.2	Sumber Daya Manusia Bappeda Provinsi Lampung.....	8
Gambar 1.3	Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan di BAPPEDA	10
Gambar 2.1	Visi BAPPEDA Provinsi Lampung.....	17
Gambar 2.2	Misi BAPPEDA Provinsi Lampung.....	17
Gambar 2.3	<i>Cascading</i> Misi RPJMD s/d Sasaran BAPPEDA.....	18
Gambar 2.4	Perubahan Perjanjian Kinerja Hal. 1 2024	39
Gambar 2.5	Perubahan Perjanjian Kinerja Hal. 2 2024	40
Gambar 2.6	Perubahan Perjanjian Kinerja Lampiran 1 2024	41
Gambar 2.7	Perubahan Perjanjian Kinerja Lampiran 2 2024	42
Gambar 2.8	Pohon Kinerja BAPPEDA.....	45
Gambar 3.1	Bobot hasil penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2024.....	57
Gambar 3.2	Website BAPPEDA Provinsi Lampung.....	62
Gambar 3.3	Analisis Rata-Rata Kenaikan Komponan Perencanaan pada Penilaian SAKIP OPD Provinsi Lampung Tahun 2022-2023.....	72
Gambar 3.4	Website Geoportal Lampung.....	75
Gambar 3.5	Analisis Rata-Rata Kenaikan Komponan Pengukuran pada Penilaian SAKIP OPD Provinsi Lampung Tahun 2022-2023.....	82
Gambar 3.6	Website Simonev BAPPEDA Provinsi Lampung.....	86
Gambar 3.7	Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024.....	87
Gambar 3.8	Website E-Pengendalian BAPPEDA Provinsi Lampung.....	120





BAB I

PENDAHULUAN

DAFTAR ISI BAB 1

1. Dasar Hukum
2. Tugas dan Fungsi
3. Struktur Organisasi
4. Sumber Daya Manusia
5. Sarana dan Prasarana
6. Sumber Pendanaan
7. Sistematika LKJ

Akuntabilitas merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan sistematika penyusunan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain sebagai pemenuhan amanat PermenPANRB tersebut, penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung juga tidak lepas dari perwujudan implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja disusun untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan Kinerja dapat memberikan gambaran sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dituntut agar dapat berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Untuk itu diperlukan laporan kinerja yang akuntabel agar terwujud suatu tata pemerintahan yang baik dan menjadi bentuk pemenuhan harapan semua pihak.

Oleh karena itu, untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, BAPPEDA sebagai unsur Penunjang Urusan Perencanaan, dituntut selalu



melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi BAPPEDA sebagai unsur perencanaan pembangunan dalam sistem Pemerintahan Daerah yang selalu berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Laporan Kinerja Tahun 2024 ini merupakan laporan kinerja yang mengacu pada perubahan Indikator Kinerja Utama Bappeda Provinsi Lampung Nomor 050/979/VI.01/SEK/2024 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 menyesuaikan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

1.1 Dasar Hukum

Laporan Kinerja BAPPEDA Tahun 2024 ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Daerah Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;



7. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Perangkat Daerah yang terintegrasi dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Prov Lampung di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung; dan
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024.

1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, BAPPEDA Provinsi Lampung mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, BAPPEDA mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggara penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. Penyelenggara perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah;



- c. Penyelenggara pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan serta pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan;
- e. Penyelenggaraan administrasi;
- f. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan;
- g. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

1.3 Struktur Organisasi

BAPPEDA Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, maka BAPPEDA merupakan unsur pelaksana penunjang pemerintahan daerah bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah, dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. BAPPEDA Provinsi Lampung terdiri dari:

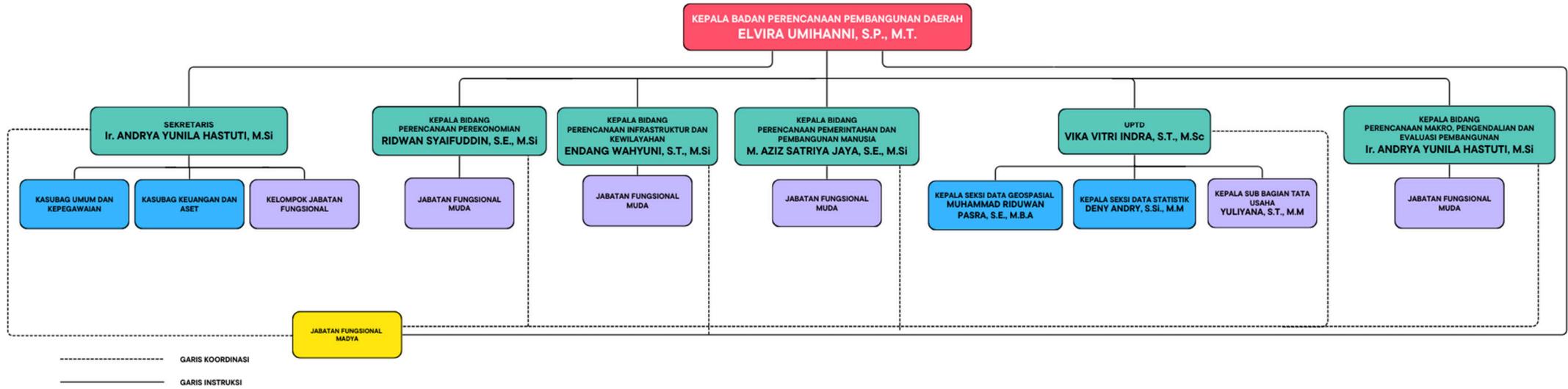
1. Sekretariat, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan terdiri dari Sub Bagian Keuangan dan Aset, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Kelompok Jabatan Fungsional Langsung di bawah Kepala Badan;
3. Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan;
4. Bidang Perencanaan Perekonomian;
5. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
6. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah (Pusdatinbangda) terdiri dari Subbag. Tata Usaha, Seksi Data Statistik dan Seksi Pengelolaan Data Geospasial.



Secara lengkap struktur organisasi BAPPEDA berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024 sebagaimana gambar di bawah ini



STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Lampung

1.4 Sumber Daya Manusia

Sumberdaya aparatur merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Berdasarkan Bagan Struktur Organisasi BAPPEDA Provinsi Lampung terdapat 11 Jabatan Struktural yaitu :

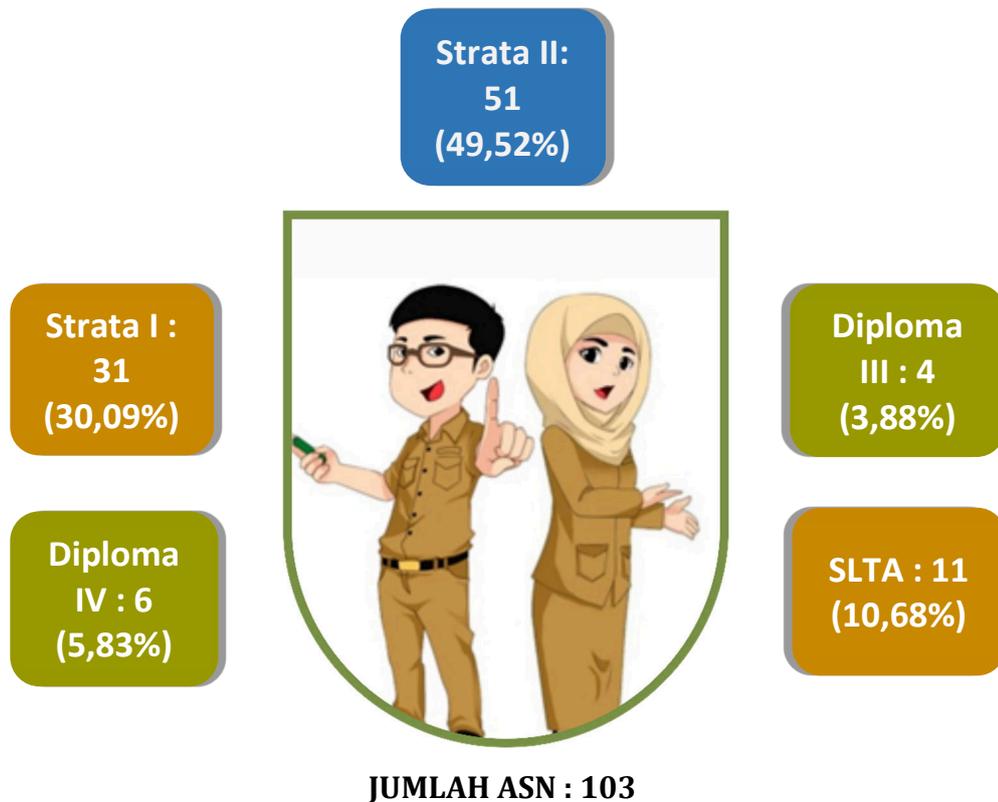
- Satu orang Kepala Badan, Eselon II.a;
- Satu orang Sekretaris, Eselon III.a;
- Empat orang Kepala Bidang, Eselon III.a;
- Satu orang Kepala UPTD, Eselon III.b;
- 3 orang Kepala Sub Bagian dan 2 orang Kepala Seksi, Eselon IV.a

Sejalan dengan kebijakan Penyederhanaan Eselonisasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah dan menindaklanjuti Permen PANRB Nomor 17/2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, dan berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung tanggal 31 Desember 2021 maka penugasan personil dalam organisasi Bappeda Provinsi Lampung juga telah disesuaikan, sebagai berikut :

Tabel 1.1. Komposisi Jabatan Eselonisasi BAPPEDA Provinsi Lampung

JABATAN	SEBELUM Pemberlakuan PermenPANRB No. 17 Tahun 2021	SESUDAH Pemberlakuan PermenPANRB No. 17 Tahun 2021
Esselon II.a	1 orang	1 orang
Esselon III.a	5 orang	5 orang
Esselon III.b	1 orang	1 orang
Esselon IV.a	18 orang	5 orang
Jumlah	25 orang	12 orang

Adapun komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan BAPPEDA Provinsi Lampung berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagaimana berikut :



Gambar 1.2. Sumber Daya Manusia BAPPEDA Provinsi Lampung

Berdasarkan Gambar di atas, ASN Bappeda pada bulan Desember tahun 2024 berjumlah 103 orang dengan kualifikasi jenjang pendidikan Strata II sebanyak 51 orang (49,52 %), Strata I dengan jumlah ASN 31 orang (30,09 %), Diploma IV sebanyak 6 orang (5,83 %), Diploma III sejumlah 4 orang (3,88 %), SLTA 11 orang (10,68 %).

Ditinjau dari jenjang kepangkatan dan golongan, dari komposisi 103 ASN di Lingkungan Bappeda Provinsi Lampung, yang terbanyak adalah Golongan III, diikuti dengan Golongan IV, Golongan II dan Golongan I dengan rincian Untuk Golongan II berjumlah 8 orang atau persentase 7,77 % dengan rincian Golongan II/d berjumlah 3 orang dan Golongan II/c sebanyak 5 orang, Golongan III berjumlah 71 orang atau persentase 68,93 % dengan rincian Golongan III/d berjumlah 34 orang, Golongan III/c sebanyak 20 orang, Golongan III/b sebanyak 11 orang, dan Golongan III/a sebanyak 6 orang.

Sedangkan Golongan IV berjumlah 24 orang atau persentase 23,30 % dengan rincian Golongan IV/d berjumlah 1 orang, Golongan IV/b sebanyak 10 orang, dan Golongan IV/a sebanyak 13 orang.

Sampai dengan Desember 2024, aparatur Bappeda Provinsi Lampung tercatat berjumlah 103 orang yang terdiri dari 11 orang pejabat struktural, 62 orang pejabat fungsional tertentu dan 30 orang pejabat fungsional umum. Kondisi kepegawaian secara umum dikelompokkan berdasarkan jenis jabatan dan jenis kelamin sebagai berikut :

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin

Uraian Jabatan	JenisKelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Pejabat Struktural	4	7	11
Pejabat Fungsional Tertentu	25	37	62
Fungsional Umum	22	8	30
TOTAL	51	52	103
PERSENTASE	49,52%	50,48%	100%

1.5 Sarana dan Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di Bappeda Provinsi Lampung sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja, walaupun masih perlu ditingkatkan agar tugas-tugas dapat berjalan lebih cepat dan profesional.

Sarana dan prasarana tersebut secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Bappeda sekaligus menunjang kinerja Bappeda Provinsi Lampung. Walaupun demikian, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penyusutan/tidak

lagi berfungsi secara optimal sehingga mampu meningkatkan kinerja Bappeda Provinsi Lampung.



Gambar 1.3 Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan di BAPPEDA

Sarana dan prasarana pendukung pelayanan di BAPPEDA secara lengkap disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.3 Sarana dan Prasarana Pendukung di BAPPEDA

NO	NAMA/JENIS BARANG	MERK/TYPE	TAHUN	JUMLAH
1.	Gedung Kantor 3 Lt	-	-	-
2.	Ruang Rapat			
	- Ruang Rapat Lt. 1	-	-	1 Ruang
	- Ruang Rapat Lt. 2	-	-	1 Ruang
	- Ruang Rapat Lt. 3	-	-	2 Ruang
	- Ruang Rapat Command Center	-	-	1 Ruang
3.	Perpustakaan	-	-	1 Ruang
4.	Kendaraan Roda 4			



NO	NAMA/JENIS BARANG	MERK/TYPE	TAHUN	JUMLAH
	1. Hilux	Toyota	2022	1 unit
	2. Fortuner	Toyota	2021	1 unit
	3. All New Hilux	Toyota	2015	1 unit
	4. New Rush	Toyota	2015	1 unit
	5. Avanza Veloz	Toyota	2014	2 unit
	6. APV	Suzuki	2007	1 unit
	7. Avanza	Toyota	2004	1 unit
5.	Kendaraan Roda 2			
	1. Sepeda Motor	Yamaha	2014	2 unit
	2. Sepeda Motor	Honda	2006	2 unit
	3. Sepeda Motor	Suzuki	2005	1 unit
	4. Sepeda Motor	Honda	2003	1 unit
	5. Sepeda Motor	Honda	1997	1 unit
	6. Sepeda Motor	Honda	1996	1 unit
6.	Sarana Pendukung			
	- Komputer	Bermacam merk dan type		89 unit
	- Note Book	Bermacam merk dan type		41 unit
	- Laptop	Bermacam merk dan type		61 unit
	- Printer	Bermacam merk dan type		99 unit
	- Camera	Bermacam merk dan type		7 Unit
	- Camera Virtual	Bermacam merk dan type		4 Unit
	- LCD	Bermacam merk dan type		16 unit
	- Televisi/ Smart TV	Bermacam merk dan type		37 unit
	- Sound System	Bermacam merk dan type		29 unit
	- Microphone	Bermacam merk dan type		8 Unit



NO	NAMA/JENIS BARANG	MERK/TYPE	TAHUN	JUMLAH
	- Mixer	Bermacam merk dan type		4 Unit
	- Microphone Meja	Bermacam merk dan type		42 Unit
	- Drone	Bermacam merk dan type		4 Unit
	- Keyboard Orgen	Bermacam merk dan type		1 Unit
	- Dispenser	Bermacam merk dan type		13 Unit
	- Air Puriffer	Bermacam merk dan type		3 Unit
	- Generator Genset	Bermacam merk dan type		2 Unit
	- Wireless	Bermacam merk dan type		1 unit
	- Scanner	Bermacam merk dan type		7 unit
	- AC	Bermacam merk dan type		49 Unit
	- GPS	Bermacam merk dan type		5 unit
	- Treadmill			1 unit
	- Sit Up Bench			1 unit
	- Power Rider			1 unit
	- Tablet Note	Bermacam merk dan type		14 unit
	- Lemari Es	Bermacam merk dan type		4 unit

Sarana dan prasarana yang menjadi aset perolehan Bappeda Provinsi Lampung, setiap tahunnya dilakukan pemuktahiran dalam aplikasi SIMADA yaitu aplikasi milik Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung untuk melakukan proses inventarisasi barang milik Pemerintah Provinsi Lampung.

1.6 Sumber Pendanaan

Pada tahun anggaran 2024 sumber dana untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Adapun uraiannya sebagai berikut :



- Berdasarkan Perda Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung T.A. 2024 dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 21 tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Lampung T.A 2024, alokasi anggaran BAPPEDA Provinsi Lampung sebesar **Rp. 37.981.061.501,-**
- Alokasi dana APBN sebesar **Rp. 1.175.927.000,-** dengan rincian :
 - 1). Program Perencanaan Pembangunan Nasional, Kegiatan Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang sebesar Rp. 1.001.002.000,-
 - 2). Program Kapasitas Pemerintah Daerah dan Desa, Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah sebesar Rp. 174.925.000,-



1.7 Sistematika Laporan Kinerja

Sistematika penulisan Laporan Kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung tahun 2024 adalah sebagai berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang latar belakang penyusunan LKj, Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi BAPPEDA Provinsi Lampung, keadaan pegawai, sarana dan prasarana, keuangan, serta Sistematika penulisan LKj.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja untuk Tahun 2019-2024. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama BAPPEDA pada tahun 2024 serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi instansi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan



organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan rekomendasi dan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan.





BAB II PERENCANAAN KINERJA

DAFTAR ISI BAB II

1. *Penjelasan Visi Misi P RPJMD 2019-2024*
2. *Tujuan, Saran, Indikator*
3. *Penjelasan IKU Bappeda*
4. *Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023*
5. *Instrumen Pendukung*

2.1 Perubahan Renstra BAPPEDA 2019-2024

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung sebagai Perangkat Daerah (PD) yang membidangi perencanaan, menyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) melalui proses sistematis yang merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Renstra perangkat daerah disusun sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan. BAPPEDA Provinsi Lampung menetapkan rencana strategis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Sejalan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2019-2024, BAPPEDA Provinsi Lampung juga telah menyusun dokumen Perubahan Rencana Strategis 2019-2024 melalui Keputusan Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung Nomor 801/143/SEK/VI.01/2021 tentang Perubahan Rencana Strategis (P Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Perubahan Renstra tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Gubernur Lampung terkait dengan penetapan/ kebijakan bahwa rencana strategis BAPPEDA Provinsi Lampung

A. Visi dan Misi

Visi Provinsi Lampung berdasarkan Perubahan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 yaitu:



Gambar 2.1 Visi BAPPEDA Provinsi Lampung

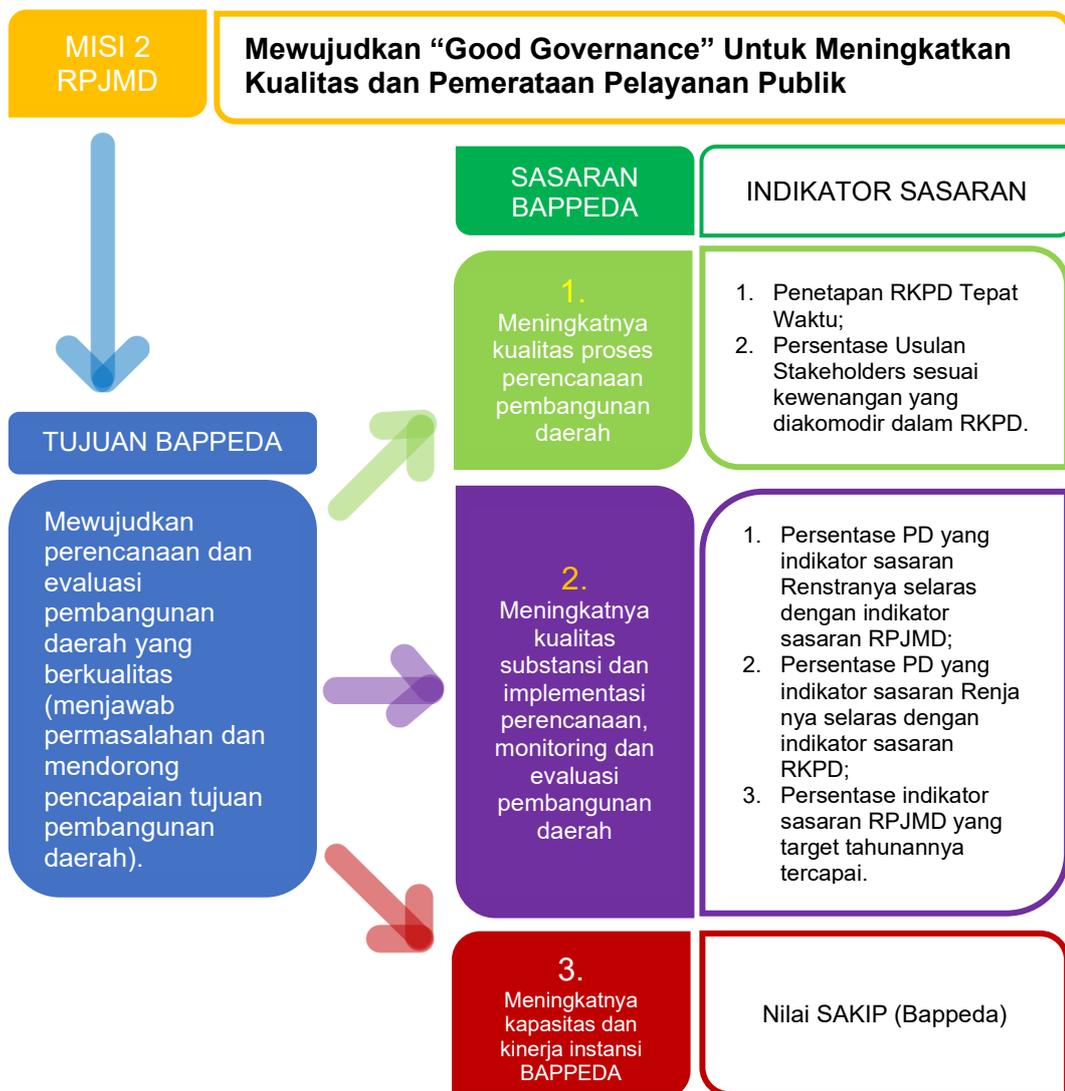
Memperhatikan Visi pembangunan tersebut, diharapkan Masyarakat Lampung menjadi "subyek utama" dalam pembangunan daerah dan dalam membangun kesejahteraannya. Dalam rangka mencapai visi "**Rakyat Lampung Berjaya**" tersebut, maka disusunlah misi sebagai bentuk penjabaran Visi sebagai berikut :



Gambar 2.2 Misi BAPPEDA Provinsi Lampung

B. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja BAPPEDA

Mengacu pada Visi Misi tersebut, BAPPEDA sebagai unsur Penunjang Pemerintahan urusan Perencanaan mendukung pencapaian Misi ke- 2 yaitu **“Mewujudkan *“good governance”* untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik”** dengan Sasaran RPJMD yaitu **“Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah”**.



Gambar 2.3 Cascading Misi RPJMD s/d Sasaran BAPPEDA

Tujuan yang ditetapkan oleh BAPPEDA Provinsi Lampung untuk mencapai visi misi Provinsi Lampung ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator BAPPEDA 2019-2024

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2024	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target				
						2020	2021	2022	2023	2024
Misi ke- 2: "Mewujudkan "good governance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik"										
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai Reformasi Birokrasi	BB	Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah.	Penetapan RKPD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
					Persentase Usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD;	30%	30%	30%	31%	32%
				Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	Persentase PD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD;	100	100	100	100	100
					Persentase PD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD;	100	100	100	100	100
					Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai.	80%	85%	90%	95%	95%
				Meningkatnya kapasitas dan kinerja Instansi Bappeda	Nilai SAKIP Bappeda	BB	BB	BB	A	A

Sumber: P-Renstra 2019-2024

Capaian indikator tata kelola pemerintahan menunjukkan tren positif, dimana penetapan RKPD setiap tahun konsisten tepat waktu, persentase usulan stakeholders yang diakomodir meningkat dari 30% pada tahun 2020 menjadi 32% pada tahun 2024, serta keselarasan indikator sasaran perangkat daerah dengan RPJMD maupun RKPD terjaga di angka 100% sepanjang periode 2020–2024. Persentase indikator RPJMD yang target tahunannya tercapai juga mengalami kenaikan signifikan dari 80% pada 2020 menjadi 95% pada 2023–2024, sejalan dengan peningkatan nilai SAKIP Bappeda dari kategori BB pada 2020–2022 menjadi kategori A pada 2023–2024. Hal ini mencerminkan bahwa upaya reformasi birokrasi dan perbaikan perencanaan



pembangunan daerah semakin efektif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

C. Indikator Kinerja Utama BAPPEDA Tahun 2024

Pada Tahun 2024, BAPPEDA melakukan perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU), melalui Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Nomor 050/979/VI.01/SEK/2024 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 menyesuaikan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Perubahan IKU ini tersebut yang menjadi panduan BAPPEDA dalam mencapai target tahun berkenaan. IKU dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :



KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG
 NOMOR : 050/979/VI.01/SEK/2024
 TANGGAL : 4 OKTOBER 2024

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG**

TUJUAN				SASARAN STRATEGIS							SUMBER DATA
NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	SASARAN	IKU	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	TARGET				
							2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKU SEBELUMNYA											
	Mewujudkan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah	Penetapan RKPD tepat waktu	<p>Makna Indikator : Penetapan RKPD Tepat Waktu merupakan aspek <i>time-bond</i> (keterikatan waktu) penyelesaian dokumen rencana kerja tahunan daerah</p> <p>Alasan Pemilihan : Penetapan RKPD Tepat Waktu menggambarkan ketercapaian target waktu dalam penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan tahunan suatu daerah</p>	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Peraturan Gubernur tentang Penetapan RKPD setiap tahun





TUJUAN				SASARAN STRATEGIS							SUMBER DATA
NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	SASARAN	IKU	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	TARGET				
							2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						<p>Rumus Perhitungan : Dihitung berdasarkan waktu penetapan RKPD maksimal setelah RKP ditetapkan</p>					
					Persentase usulan stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD	<p>Makna Indikator : Persentase usulan stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD merupakan persentase jumlah kegiatan yang diakomodir dalam RKPD melalui : 1. Usulan Masyarakat, 2. Pokir DPRD, dan 3. Usulan Kabupaten/Kota.</p> <p>Alasan Pemilihan : Usulan stakeholder menjadi salah satu ukuran keberhasilan konsep perencanaan</p>	30%	30%	31%	32%	Berita Acara Desk Musrenbang RKPD





TUJUAN				SASARAN STRATEGIS							SUMBER DATA
NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	SASARAN	IKU	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	TARGET				
							2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						<p>melalui pendekatan <i>bottom up</i> (dari bawah/masyarakat) sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan</p> <p>Rumus Perhitungan : Dihitung berdasarkan usulan <i>stakeholder</i> sesuai dengan kewenangan yang diakomodir di RKPD dibagi jumlah seluruh usulan <i>stakeholder</i> yang sesuai kewenangan dikali 100%</p>					
				Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase keselarasan indikator sasaran renstra OPD dengan	Makna Indikator : Persentase keselarasan indikator sasaran renstra OPD dengan indikator sasaran RPJMD merupakan jumlah	100%	100%	100%	100%	Renstra OPD dan Peraturan Gubernur tentang RPJMD





TUJUAN				SASARAN STRATEGIS							SUMBER DATA
NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	SASARAN	IKU	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	TARGET				
							2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					indikator sasaran RPJMD	<p>persentase yang menggambarkan kesesuaian antara indikator sasaran yang ditetapkan dalam Renstra OPD dengan indikator yang dijadikan sasaran dalam RPJMD</p> <p>Alasan Pemilihan : Konsistensi/keselarasan antara indikator sasaran OPD dengan indikator sasaran RPJMD adalah salah satu parameter keberhasilan kinerja perencanaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan dan target kinerja kepala daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan diampu oleh OPD</p>					





TUJUAN				SASARAN STRATEGIS							SUMBER DATA
NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	SASARAN	IKU	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	TARGET				
							2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						<p>Rumus Perhitungan : Dihitung berdasarkan jumlah OPD yang memiliki indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD dibagi jumlah OPD lingkup Provinsi Lampung</p>					
					Persentase keselarasan indikator sasaran Renja OPD dengan indikator sasaran RKPD	<p>Makna Indikator : Persentase keselarasan indikator sasaran Renja OPD dengan indikator sasaran RKPD merupakan jumlah persentase yang menggambarkan kesesuaian antara indikator sasaran yang ditetapkan dalam rencana kerja tahunan OPD</p>	100%	100%	100%	100%	Peraturan Gubernur tentang RKPD, Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur tentang APBD dan Dokumen Evaluasi





TUJUAN				SASARAN STRATEGIS							SUMBER DATA
NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	SASARAN	IKU	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	TARGET				
							2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						<p>dengan indikator yang dijadikan sasaran dalam RKPD</p> <p>Alasan Pemilihan : Konsistensi/keselarasan antara indikator sasaran Renja OPD dengan indikator sasaran RKPD adalah salah satu parameter keberhasilan kinerja perencanaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan dan target kinerja kepala daerah yang dijabarkan dalam RKPD.</p> <p>Rumus Perhitungan : Dihitung berdasarkan jumlah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RKPD yang dilaksanakan pada</p>					RKPD Tahun berkenaan





TUJUAN				SASARAN STRATEGIS							SUMBER DATA
NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	SASARAN	IKU	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	TARGET				
							2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						APBD dibagi jumlah seluruh Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RKPD dikali 100%					
					Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai	<p>Makna Indikator : Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai merupakan jumlah persentase ketercapaian/realisasi dari target indikator kinerja Kepala Daerah setiap tahun dalam satu periode RPJMD</p> <p>Alasan Pemilihan : Ketercapaian target indikator sasaran adalah potret keberhasilan pembangunan yang</p>	85%	90%	95%	95%	Dokumen Hasil Evaluasi RKPD Tahun Berkenaan





TUJUAN				SASARAN STRATEGIS							SUMBER DATA
NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	SASARAN	IKU	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	TARGET				
							2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						<p>diukur setiap tahun dalam periode RPJMD berkenaan. Realisasi terhadap target indikator sasaran tidak lepas dari aspek perencanaan yang mengimplementasikan konsep SMART (<i>specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound</i>)</p> <p>Rumus Perhitungan : Dihitung berdasarkan jumlah capaian indikator sasaran RPJMD yang diatas 95% dibagi jumlah seluruh indikator RPJMD dikali 100%</p>					
IKU PERUBAHAN											
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	BB		Indeks Perencanaan Pembangunan	Makna Indikator : Indeks Perencanaan Pembangunan (IPP) merupakan pengukuran	-	-	-	82	





TUJUAN				SASARAN STRATEGIS							SUMBER DATA
NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	SASARAN	IKU	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	TARGET				
							2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						<p>efektivitas, kualitas, dan komprehensivitas proses perencanaan pembangunan dalam rangka memperkuat dan mempertajam keselarasan serta kesesuaian rencana pembangunan nasional.</p> <p>Alasan Pemilihan : Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Pemerintah Daerah oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS</p> <p>Rumus Perhitungan : Komponen Sinergi (32%) + Komponen Kualitas Perencanaan (58%) + Komponen</p>					





TUJUAN				SASARAN STRATEGIS							SUMBER DATA
NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	SASARAN	IKU	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	TARGET				
							2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja (10%) Maksimum bobot penilaian : Komponen Sinergi (32) Kualitas Perencanaan (58) Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja (10), Total bobot penilaian sebesar 100 (seratus)					
2					Nilai Komponen Perencanaan pada Penilaian SAKIP Provinsi Lampung	Makna Indikator : Nilai komponen perencanaan pada penilaian SAKIP merupakan salah satu indikator keberhasilan kinerja perencanaan pembangunan yang	-	-	-	22.45	Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi





TUJUAN				SASARAN STRATEGIS							SUMBER DATA
NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	SASARAN	IKU	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	TARGET				
							2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						selaras dan berkesinambungan. Alasan Pemilihan : Nilai komponen perencanaan dalam penilaian SAKIP sesuai Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021 diampu oleh BAPPEDA selaku <i>leading sector</i> perencanaan pembangunan daerah. Rumus Perhitungan : Berdasarkan nilai komponen Perencanaan pada evaluasi SAKIP oleh Kemen PAN dan RB pada Tahun N-1 (Bobot 30 dari rentang nilai 100)					Lampung dari KemenPAN RB
3					Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada	Makna Indikator : Nilai komponen pengukuran pada penilaian SAKIP memiliki	-	-	-	19,05	Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas





TUJUAN				SASARAN STRATEGIS							SUMBER DATA
NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	SASARAN	IKU	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	TARGET				
							2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Penilaian SAKIP Provinsi Lampung	<p>makna pengukuran kinerja yang berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.</p> <p>Alasan Pemilihan : Nilai komponen pengukuran dalam penilaian SAKIP sesuai PermenPAN RB Nomor 89 Tahun 2021 diampu oleh BAPPEDA selaku leading sector perencanaan pembangunan daerah.</p> <p>Rumus Perhitungan : Berdasarkan nilai komponen Pengukuran pada evaluasi SAKIP oleh KemenPAN dan RB pada</p>					Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Lampung dari KemenPAN RB





TUJUAN				SASARAN STRATEGIS						SUMBER DATA	
NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	SASARAN	IKU	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	TARGET				
							2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Tahun N-1 (Bobot 30 dari rentang nilai 100)					

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal, 4 Oktober 2024

KEPALA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG,



ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T.

Pembina Utama Madya

NIP. 19730524 199703 2002



Berdasarkan hasil evaluasi LHE KEMENPAN-RB, terdapat beberapa indikator yang perlu dikoreksi, disempurnakan, atau disesuaikan agar lebih relevan dan terukur dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Beberapa alasan perubahan utama dalam IKU mencakup:

1. Penyesuaian indikator untuk memastikan keselarasan dengan standar evaluasi KEMENPAN-RB;
2. Revisi target kinerja berdasarkan rekomendasi evaluasi yang lebih realistis dan akuntabel.
3. Penyempurnaan metode pengukuran untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas data kinerja.
4. Penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi guna memastikan implementasi yang lebih efektif.

2.2 Perubahan Renja Tahun 2024

Mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017, Perubahan Renja Tahun 2024 BAPPEDA Provinsi Lampung dapat dijelaskan menggunakan table T-C.33 pada seperti tabel dibawah ini:

Tabel 2.2 Tabel IKU P-Renja Tahun 2024

IKU	Realisasi 2023 (%)	Renja 2024		Perubahan Renja 2024	
		Anggaran	Target	Anggaran	Target
Penetapan RKPD Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		-
Persentase usulan stakeholders yang diakomodir dalam RKPD	43,3%	7.489.938.141	32%	-	-
Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD	100%	8.292.999.506	100%	-	-
Persentase OPD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD	100%		100%		-
Persentase indikator sasaran RPJMD yang tepat tahunannya tercapai	95%	-	95%	-	-

Sumber: Renja Tahun 2024 dan P-Renja Tahun 2024

Tabel 2.3 Tabel Perubahan IKU P-Renja Tahun 2024

IKU	Realisasi 2023 (%)	Renja 2024		Perubahan Renja 2024	
		Anggaran	Target	Realisasi Anggaran	Target
Indeks Perencanaan Pembangunan	100	5.188.388.600	82	4.481.537.161	82
Nilai Komponen Perencanaan pada Penilaian SAKIP Provinsi Lampung	97,6	5.174.652.800	22,45	4.564.475.557	22,45
Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP Provinsi Lampung	96,7	1.134.273.700	19,05	934.015.089	19,05

Sumber: Renja Tahun 2024 dan P-Renja Tahun 2024



Berdasarkan hasil pencermatan terhadap Tabel 2.2 dan Tabel 2.3, terlihat bahwa indikator kinerja utama (IKU) dalam Renja Tahun 2024 mengalami perubahan. Pada tahun 2023 Capaian IKU relatif baik, misalnya penetapan RKPD tepat waktu, persentase usulan stakeholders mencapai 43,3%, sementara keselarasan indikator OPD dengan RPJMD maupun RKPD sudah mencapai 100%, serta indikator sasaran RPJMD yang tepat tahunan sebesar 95%. Pada tahun 2024, target sebagian besar indikator tersebut tetap dipertahankan, meskipun terdapat penurunan target untuk usulan stakeholders yang hanya ditetapkan sebesar 32% dengan alokasi anggaran Rp7,48 miliar, sebagai bentuk penajaman fokus pada prioritas pembangunan.

Sementara itu, pada tabel kedua yang memuat Perubahan IKU, didapatkan realisasi tahun 2023 menunjukkan capaian tinggi di atas 96%, dan pada tahun 2024 target ditetapkan relatif stabil, misalnya Indeks Perencanaan sebesar 82, Nilai Komponen Perencanaan 22,45, serta Nilai Komponen Pengukuran Kinerja 19,05. Meskipun demikian, terdapat rasionalisasi anggaran, seperti pada Indeks Perencanaan yang awalnya Rp5,18 miliar menjadi Rp4,48 miliar, dan pada Nilai Komponen Pengukuran Kinerja yang dari Rp1,13 miliar direalisasikan Rp934 juta, namun target capaian tetap dipertahankan sesuai standar yang ditetapkan.

Perubahan IKU dari yang lama ke yang baru ini mencerminkan adanya pergeseran pendekatan pengukuran kinerja. Perubahan ini dilakukan dengan tujuan agar indikator yang digunakan lebih relevan, realistis, akuntabel, serta mampu menggambarkan capaian pembangunan secara lebih valid dan reliabel. Selain itu, penyesuaian ini juga memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi agar implementasi program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan terukur. Dengan demikian, Perubahan Renja 2024 tidak hanya mempertahankan konsistensi perencanaan melalui IKU lama, tetapi juga menyempurnakan arah kebijakan dengan menambahkan IKU baru yang lebih menekankan pada kualitas dan akuntabilitas kinerja pembangunan daerah.





2.3 Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau PA, sehingga setiap target yang ditetapkan memiliki keselarasan dengan arah pembangunan daerah dan dapat diukur secara akuntabel. Berikut merupakan Perubahan Perjanjian Kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2024 yang selanjutnya dituangkan secara formal dalam dokumen perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung selaku Pihak Pertama dan Penjabat Gubernur Lampung selaku Pihak Kedua, sebagai wujud komitmen bersama dalam pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi atas capaian target kinerja yang telah ditetapkan.





**PERUBAHAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ELVIRA UMIHANNI, S.P.,M.T.**
Jabatan : **KEPALA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SAMSUDIN**
Jabatan : **PENJABAT GUBERNUR LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2024

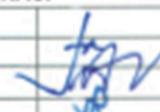
Pihak Kedua,
Pj. GUBERNUR LAMPUNG,

Pihak Pertama,
KEPALA BAPPEDA
PROVINSI LAMPUNG,




SAMSUDIN

ELVIRA UMIHANNI, S.P.,M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19730524 199703 2 002

PARAF KOORDINASI	
WAKIL GUBERNUR	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN II	
KA. BAPPEDA	

Jalan Wolter Monginsidi No. 69 Telukbetung Bandar Lampung 35215
Telp. (0721) 481166 Faks. (0721) 481501

Gambar 2.4 Perubahan Perjanjian Kinerja Hal. 1 2024





**PERUBAHAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ELVIRA UMIHANNI, S.P.,M.T.**
Jabatan : **KEPALA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SAMSUDIN**
Jabatan : **PENJABAT GUBERNUR LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2024

Pihak Kedua,
Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Pihak Pertama,
KEPALA BAPPEDA
PROVINSI LAMPUNG,



ELVIRA UMIHANNI, S.P.,M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19730524 199703 2 002

Jalan Wolter Monginsidi No. 69 Telukbetung Bandar Lampung 35215
Telp. (0721) 481166 Faks. (0721) 481501

Gambar 2.5 Perubahan Perjanjian Kinerja Hal 22024





LAMPIRAN I APBD

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengukuran pembangunan daerah.	Indeks Perencanaan Pembangunan;	82
		Nilai Perencanaan kinerja SAKIP Provinsi;	22,45
		Nilai Pengukuran kinerja SAKIP Provinsi.	19,05

<u>Program/Kegiatan</u>	<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Keterangan</u>
1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		
a) Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.854.852.600	P APBD
b) Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.472.751.400	P APBD
c) Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.551.152.600	P APBD
d) Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	309.632.000	P APBD
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.193.058.800	P APBD
a) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2.172.775.400	P APBD
b) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1.943.092.300	P APBD

Gambar 2.6 Perubahan Perjanjian Kinerja Lampiran 1 2024





<u>Program/Kegiatan</u>	<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Keterangan</u>
c) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah		
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
a) Kegiatan Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	441.338.611	P APBD
b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.872.259.240	P APBD
c) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	86.447.000	P APBD
d) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	461.255.000	P APBD
e) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.882.840.300	P APBD
f) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	133.573.100	P APBD
g) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.901.353.873	P APBD
h) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	704.679.277	P APBD
Jumlah	37.981.061.501	

Telukbetung, Oktober 2024

Pihak Kedua,
Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



Pihak Pertama,
KEPALA BAPPEDA
PROVINSI LAMPUNG,

ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19730524 199703 2 002

Gambar 2.7 Perubahan Perjanjian Kinerja Lampiran 2 2024



Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Bappeda Provinsi Lampung menetapkan satu sasaran strategis utama, yaitu meningkatnya kualitas perencanaan dan pengukuran pembangunan daerah. Untuk mengukur capaian sasaran tersebut, ditetapkan tiga indikator kinerja: Indeks Perencanaan Pembangunan dengan target 82, Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP Provinsi dengan target 22,45, serta Nilai Pengukuran Kinerja SAKIP Provinsi dengan target 19,05. Indikator ini dipilih agar kinerja Bappeda tidak hanya terlihat dari aspek kepatuhan administratif, tetapi juga dari kualitas perencanaan dan efektivitas pengukuran kinerja pembangunan daerah.

Jika dibandingkan dengan dokumen sebelumnya, terlihat adanya perubahan indikator kinerja utama (IKU) dan pergeseran anggaran. Perubahan IKU dilakukan agar pengukuran kinerja Bappeda lebih selaras dengan standar evaluasi Kementerian PAN-RB, khususnya dalam kerangka penilaian SAKIP. Sementara itu, perubahan anggaran dilakukan dalam rangka penyesuaian terhadap prioritas dan efisiensi penggunaan belanja. Beberapa kegiatan mengalami rasionalisasi nilai anggaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan, sementara kegiatan yang mendukung penguatan sistem informasi, pengendalian, dan evaluasi tetap mendapatkan porsi memadai. Dengan demikian, baik perubahan anggaran maupun perubahan IKU saling mendukung.

2. 4 Keselarasan Dokumen SAKIP

Pada bulan Oktober 2024 Bappeda melakukan penyesuaian IKU berdasarkan LHE KEMENPAN-RB, antara lain :





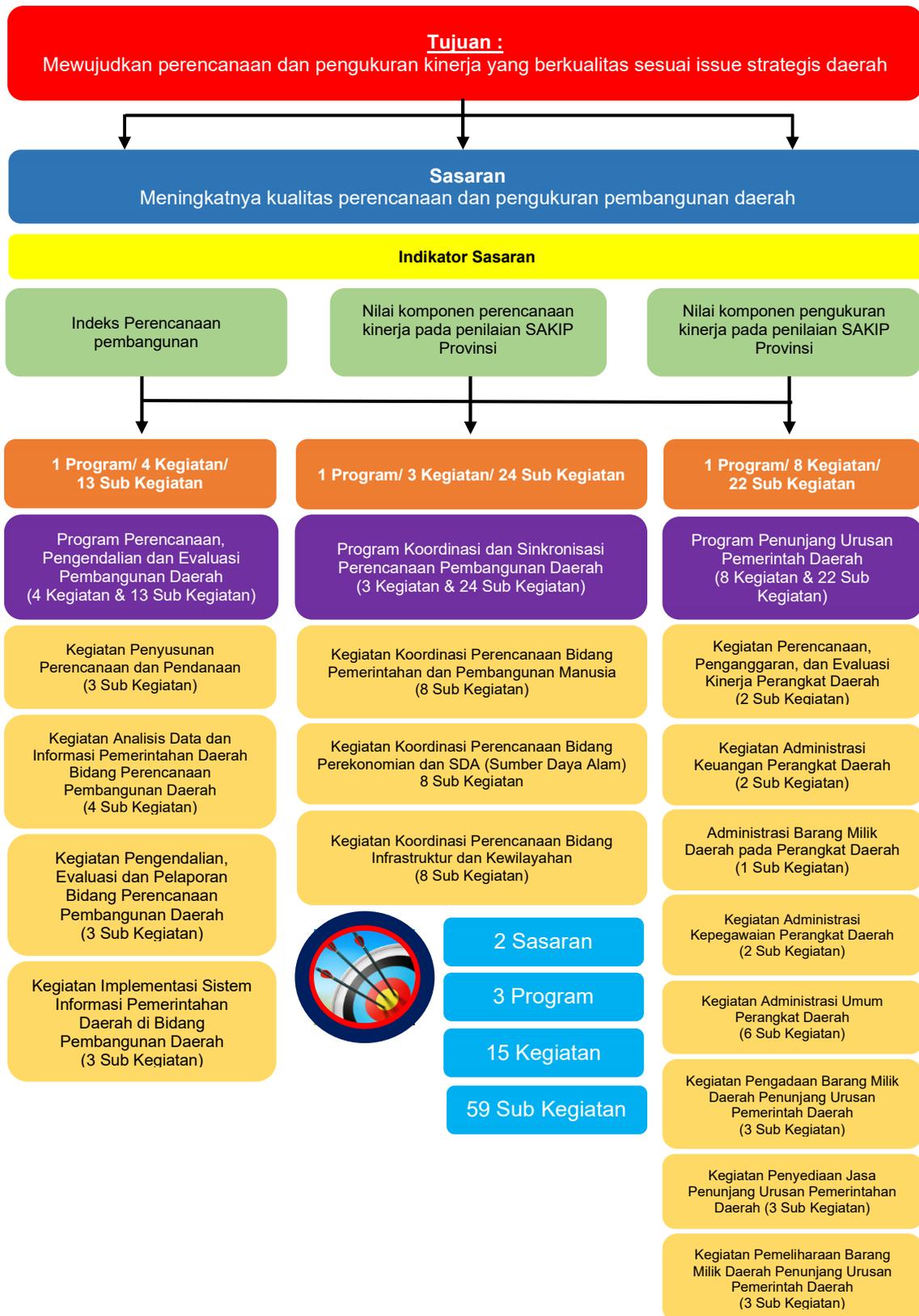
Tabel 2.4 Tabel Keselarasan Dokumen Perencanaan 2024

SEBELUM PERUBAHAN							
NO	SASARAN	IKU	Realisasi 2023	P-Renstra	P-Renja	Perubahan PK 2024	KET.
1	Meningkatnya kualitas proses perencanaan dan Pengukuran pembangunan daerah	Penetapan RKPD tepat waktu	Bulan Juni 2023	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	-	-
		Persentase usulan stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD	48,95%	32%	32%	-	-
		Persentase keselarasan indikator sasaran renstra OPD dengan indikator sasaran RPJMD	100%	100%	100%	-	-
		Persentase keselarasan indikator sasaran Renja OPD dengan indikator sasaran RKPD	100 %	100%	100%	-	-
		Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai	95%	95%	95%	-	-
SESUDAH PERUBAHAN							
No.	SASARAN	IKU	Realisasi 2023	P-Renstra	P-Renja	Perubahan PK 2024	KET.
1.	Meningkatnya kualitas proses perencanaan dan Pengukuran pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	81,01	-	82	82	Menyesuaikan LHE KEMENPAN
		Nilai Komponen Perencanaan pada Penilaian SAKIP Provinsi Lampung	22,43	-	22,45	22,45	Menyesuaikan LHE KEMENPAN
		Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP Provinsi Lampung	19,04	-	19,05	19,05	Menyesuaikan LHE KEMENPAN

Sumber: Olahan Data Diskominfotik

Dengan adanya perubahan ini, diharapkan kinerja BAPPEDA dapat lebih optimal, akuntabel, dan transparan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh KEMENPAN-RB. Penyesuaian IKU ini juga menjadi bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berorientasi pada hasil.





Gambar 2.8 Pohon Kinerja Bappeda

2.5 Dukungan Program Unggulan BAPPEDA terhadap IKU

Sebagai upaya pencapaian Indikator Kinerja Utama BAPPEDA, dibutuhkan inovasi yang dapat menjadi faktor akselerasi pencapaian IKU. Berikut dukungan inovasi BAPPEDA di tahun 2024 terhadap pencapaian IKU BAPPEDA:

Tabel 2.5 Dukungan Program Unggulan Bappededa terhadap IKU

No	IKU	Program Unggulan/Inovasi
1.	Indeks Perencanaan Pembangunan	Pengoptimalan layanan sinkronisasi data perencanaan pada website BAPPEDA dan website Geoportal untuk data Geospasial
2.	Nilai Komponen Perencanaan pada Penilaian SAKIP Provinsi Lampung	Pengoptimalan layanan sinkronisasi data perencanaan pada website BAPPEDA dan website Geoportal untuk data Geospasial
3.	Nilai Komponen Pengukuran pada Penilaian SAKIP Provinsi Lampung	Aplikasi Pengukuran Kinerja SIMONEV

Bentuk peningkatan layanan informasi dan perencanaan BAPPEDA Provinsi Lampung telah memanfaatkan media teknologi informasi tidak lain untuk mempercepat akses informasi perencanaan pembangunan dan peningkatan kapasitas BAPPEDA sebagai institusi perencanaan sehingga dapat memberikan manfaat kepada *stakeholder* terkait.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

DAFTAR ISI BAB III

1. Kerangka Pengukuran;
2. Capaian IKU Bappeda;
3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis;
4. Akuntabilitas Keuangan Pagu dan Realisasi Keuangan Tahun 2024
5. Prestasi yang Diraih BAPPEDA Provinsi Lampung di Tahun 2024
6. Rekomendasi Terhadap Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999, akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungwaban secara periodik.

Dokumen Perubahan RPJMD 2019-2024, Bappeda Provinsi Lampung telah menetapkan dan mengukur capaian tiga indikator kinerja utama (IKU). Capaian ini diperoleh melalui evaluasi atas masing-masing indikator kinerja serta pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan efektivitas program serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pembangunan daerah.

Sebagai bentuk standarisasi pengukuran kinerja, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 mengatur penggunaan skala ordinal untuk mengelompokkan predikat capaian realisasi kinerja. Penggunaan skala ini memberikan pemetaan yang lebih jelas terkait pencapaian target dan perbaikan yang diperlukan dalam pelaksanaan program pembangunan. Informasi lebih lanjut mengenai skala dan pengelompokan predikat kinerja dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

Urutan	Rentang Capaian	Kriteria Capaian
1	Lebih dari 90%	Sangat Memuaskan
2	Diatas 80% sampai dengan 90%	Memuaskan
3	Diatas 70% sampai dengan 80%	Sangat Baik
4	Diatas 60% sampai dengan 70%	Baik
5	Diatas 50% sampai dengan 60%	Cukup
6	Kurang dari 50%	Kurang

3.2 IKU Tujuan dan Capaian IKU pada Bappeda Provinsi Lampung

Penentuan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan aspek fundamental bagi setiap instansi pemerintahan untuk mengukur peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan instrument yang dijadikan alat untuk mengukur kinerja instansi pemerintah. Untuk itu hal pertama yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi yang bersangkutan. Dengan demikian, kinerja utama dapat diakomodir dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU dijadikan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Upaya peningkatan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lampung selalu ditingkatkan setiap tahunnya, Indikator Kinerja Utama juga dilakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan kinerja suatu organisasi.

Adapun hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Lampung tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:



Tabel 3.2 Target dan Capaian IKU BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN UTAMA	Satuan	KINERJA 2019 (%)		KINERJA 2020 (%)		KINERJA 2021 (%)		KINERJA 2022 (%)		KINERJA 2023 (%)		KINERJA 2024 (%)					
									Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)			
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai Reformasi Birokrasi	BB	A	-	Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah.	Penetapan RKPD tepat waktu		-	-	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	-	-									
					-		Persentase usulan stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD	Persen	-	-	30	29,45	30	23,92	30	42,77	31	48,95	32	-	-			
					-	Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase keselarasan indikator sasaran renstra OPD dengan indikator sasaran RPJMD	Persen	-	-	100	81,25	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-
					-		Persentase keselarasan indikator sasaran Renja OPD dengan indikator sasaran RKPD	Persen	-	-	100	81,25	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-
					-		Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai	Persen	-	-	80	51,85	85	100	90	90	95	95	95	95	95	-	-	
-	Meningkatnya kapasitas dan kinerja Instansi Bappeda	Nilai SAKIP		-	-	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	A	A	A	A	A	-	-					

Sumber: Renstra 2025-2026



Dalam periode Renstra 2020–2024, BAPPEDA Provinsi Lampung menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berfokus pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui penguatan proses perencanaan, pengendalian, serta evaluasi pembangunan daerah. Beberapa indikator yang digunakan antara lain penetapan RKPD tepat waktu, persentase usulan stakeholders yang diakomodir dalam RKPD, persentase keselarasan indikator sasaran Renstra OPD dengan indikator sasaran RPJMD, serta persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai. Selain itu, indikator Nilai SAKIP juga menjadi tolok ukur peningkatan kapasitas dan kinerja kelembagaan BAPPEDA. Capaian tahun 2020–2023 menunjukkan adanya tren positif dengan peningkatan konsistensi capaian indikator, meskipun pada beberapa aspek masih terdapat deviasi capaian terhadap target yang ditetapkan.

Namun demikian, berdasarkan hasil evaluasi LHE KEMENPAN-RB, terdapat beberapa indikator yang dinilai perlu disempurnakan agar lebih relevan, akurat, dan terukur dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Beberapa alasan perubahan utama dalam IKU mencakup:

1. Penyesuaian indikator untuk memastikan keselarasan dengan standar evaluasi KEMENPAN-RB;
2. Revisi target kinerja berdasarkan rekomendasi evaluasi yang lebih realistis dan akuntabel;
3. Penyempurnaan metode pengukuran untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas data kinerja;
4. Penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi guna memastikan implementasi yang lebih efektif.

Oleh karena itu, dilakukan penyesuaian dan penyusunan kembali IKU baru yang berlaku pada periode Renstra 2019–2024 sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:



Tabel 3.3 Target dan Capaian Perubahan IKU BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

NO (1)	TUJUAN (2)	INDIKATOR TUJUAN (3)	TARGET 2024 (4)	REALISASI 2024 (5)	CAPAIAN 2024 (6)	SASARAN STRATEGIS (7)	INDIKATOR SASARAN UTAMA (8)	Satuan (9)	KINERJA 2019		KINERJA 2020		KINERJA 2021		KINERJA 2022		KINERJA 2023		KINERJA 2024		CAPAIAN % (22)
									Target (10)	Realisasi (11)	Target (12)	Realisasi (13)	Target (14)	Realisasi (15)	Target (16)	Realisasi (17)	Target (18)	Realisasi (19)	TARGET (20)	REALISASI (21)	
I	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai Reformasi Birokrasi	BB	A	114	Meningkatnya kualitas proses perencanaan dan pengukuran pembangunan daerah;	Indeks Perencanaan Pembangunan	Indeks	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	93,94	114
							Nilai Komponen Perencanaan pada Penilaian SAKIP Provinsi Lampung	Nilai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,45	21,93	97,6
							Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP Provinsi Lampung	Nilai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,05	18,44	96,7

Sumber: P-Renstra 2019-2024



Dari 3 indikator kinerja utama yang telah ditetapkan oleh BAPPEDA Provinsi Lampung pada Tahun 2024 sebanyak 1 indikator mencapai target kinerja lebih dari 100% (sangat tinggi), sedangkan capaian indikator lain juga mencapai kinerja sangat tinggi yaitu masing-masing 97,6% dan 96,7%. Bahkan untuk indikator Indeks Perencanaan Pembangunan, capaian kinerja yang diraih oleh BAPPEDA Provinsi Lampung menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dari 81,01 dengan predikat “MEMUASKAN” pada tahun 2023 menjadi 93,94 dengan predikat “SANGAT MEMUASKAN” pada Tahun 2024.

3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja BAPPEDA Tahun 2024

Secara umum BAPPEDA Provinsi Lampung telah mampu melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2024 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024. Jumlah Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 sebanyak 3 (tiga) indikator sasaran utama.

Pengukuran terhadap capaian dari 3 indikator sasaran utama yang sudah ditetapkan dalam SK IKU Perubahan BAPPEDA Tahun 2024 perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan BAPPEDA Provinsi Lampung sebagai Perangkat Daerah yang menjadi *leading sector* perencanaan pembangunan di Provinsi Lampung. Jika dilihat dari capaian sasaran utama di Tahun 2024, dari 3 indikator kinerja utama telah mencapai kinerja sangat tinggi.

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 3 indikator kinerja utama, sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Indikator Kinerja Utama BAPPEDA Tahun 2024 Nomor 050/979/VI.1/SEK/2024. Analisis pencapaian indikator kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci diuraikan sebagai berikut :

3.3.1 Sasaran : Meningkatkan kualitas proses perencanaan dan pengukuran pembangunan daerah

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pembangunan, Provinsi Lampung terus memperkuat kualitas proses perencanaan dan pengukuran kinerja pembangunan daerah melalui pendekatan yang terintegrasi dan partisipatif. Rangkaian kegiatan yang telah dilakukan meliputi: Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, FGD, Pelaksanaan Konsultasi Publik, Pelaksanaan Desk Rakortekrenbang, Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi, Fasilitasi dan evaluasi Kabupaten/Kota, Pelaksanaan Desk Musrenbang Provinsi Lampung, Temu konsultasi Bappenas dan Bappeda Provinsi se-Indonesia, Desk pencermatan dan pembahasan usulan pikir DPRD, desk pembahasan renja yang dilakukan guna memastikan setiap usulan dan program disusun berdasarkan analisis mendalam dan aspirasi masyarakat.

Sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja perencanaan, sasaran ini dinilai berdasarkan tiga indikator utama sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama BAPPEDA Tahun 2024 Nomor : 050/979/VI.01/SEK/2024 , antara lain:

1. Indeks Perencanaan Pembangunan
2. Nilai Komponen Perencanaan pada Penilaian SAKIP Provinsi Lampung
3. Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP Provinsi Lampung

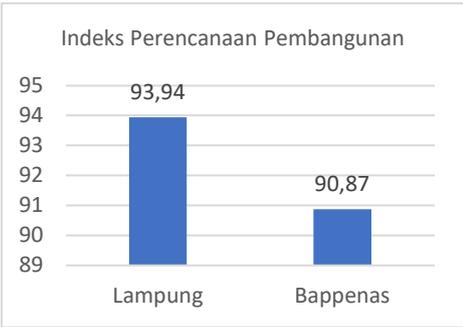
Melalui perbaikan sistem perencanaan dan pengukuran yang terintegrasi, diharapkan kebijakan pembangunan daerah semakin tepat sasaran, terukur, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

1. Indeks Perencanaan Pembangunan

Indeks Perencanaan Pembangunan (IPP) adalah alat evaluasi yang digunakan untuk menilai kualitas perencanaan pembangunan daerah guna

memastikan efektivitas, efisiensi, dan keselarasan dengan kebijakan pembangunan nasional maupun kebutuhan lokal. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Bab II pasal 2 menjelaskan mengenai tujuan SPPN adalah untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi instrumen yang digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) untuk mengukur sejauh mana perencanaan pembangunan daerah disusun dengan baik, melibatkan pemangku kepentingan, serta memiliki dokumen yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Capaian Indeks Perencanaan Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.4 Capaian Indeks Perencanaan Pembangunan (2023-2024)

Sasaran					
Sasaran		Meningkatnya Kualitas Proses Perencanaan dan Pengukuran Pembangunan Daerah			
IKU		Indeks Perencanaan Pembangunan			
Satuan		Angka			
Capaian Indeks Perencanaan Pembangunan					
No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Diagram Pencapaian IPP Pemerintah Provinsi Lampung
1.	2023	-	81,01	-	
2.	2024	82	93,94	114%	

Indeks Perencanaan Pembangunan juga merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas proses perencanaan pembangunan di suatu daerah. Indeks ini mencerminkan sejauh mana perencanaan pembangunan dilakukan secara efektif, berbasis data, partisipatif, serta selaras dengan kebijakan nasional dan daerah. Sejak pertama kali dirilis pada Tahun 2023,

capaian kinerja yang diraih oleh BAPPEDA Provinsi Lampung menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dari 81,01 dengan predikat “MEMUASKAN” pada tahun 2023 menjadi 93,94 dengan predikat “SANGAT MEMUASKAN” pada Tahun 2024. Indikator Indeks Perencanaan Pembangunan dengan pencapaian target diatas 114% ini merupakan implementasi terhadap konsep “SMART” (*Specific, Measurable, attainable, realistic, time bond*). Hal ini menunjukkan bahwa tahapan perencanaan pembangunan di Provinsi Lampung telah berjalan dengan sangat memuaskan.

Tabel 3.5 Capaian Indeks Perencanaan Pembangunan Provinsi Lampung dan Nasional (BAPPENAS) Tahun 2024

Sasaran		
Sasaran	Meningkatnya Kualitas Proses Perencanaan dan Pengukuran Pembangunan Daerah	
IKU	Indeks Perencanaan Pembangunan	
Satuan	Angka	
2024		Nasional (Bappenas)
Target	Realisasi/Capaian	90,87
82	93,94/114%	

Dilihat dari tabel Indeks Perencanaan Pembangunan Provinsi Lampung dan Nasional (BAPPENAS) Tahun 2024, capaian IPP Provinsi Lampung lebih tinggi dibandingkan dengan capaian IPP BAPPENAS selaku instansi pembina BAPPEDA di tingkat Kementerian. Meskipun metodologi penilaian IPP di tingkat daerah berbeda dengan penilaian IPP Kementerian/Lembaga pusat, capaian kinerja IPP Provinsi Lampung ini menjadi prestasi yang sangat membanggakan.

Adapun aspek penilaian yang dijadikan sebagai dasar untuk mengukur kualitas hasil perencanaan dalam IPPN Pemerintah Provinsi/Daerah, meliputi:

1) Sinergi

Aspek Sinergi ditujukan untuk mengukur kerjasama yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mencapai sasaran Prioritas Nasional. Keterpaduan perencanaan pusat dan daerah khususnya

dukungan/kontribusi pembangunan daerah terhadap pencapaian sasaran Prioritas Nasional. Keterpaduan diukur atas:

- Keselarasan Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN.
- Keselarasan Dokumen RKPD dengan RKP.
- Kesesuaian Anggaran Daerah (APBD) untuk Membiayai Program Prioritas Nasional/*Major Project* dalam Dokumen RKPD.

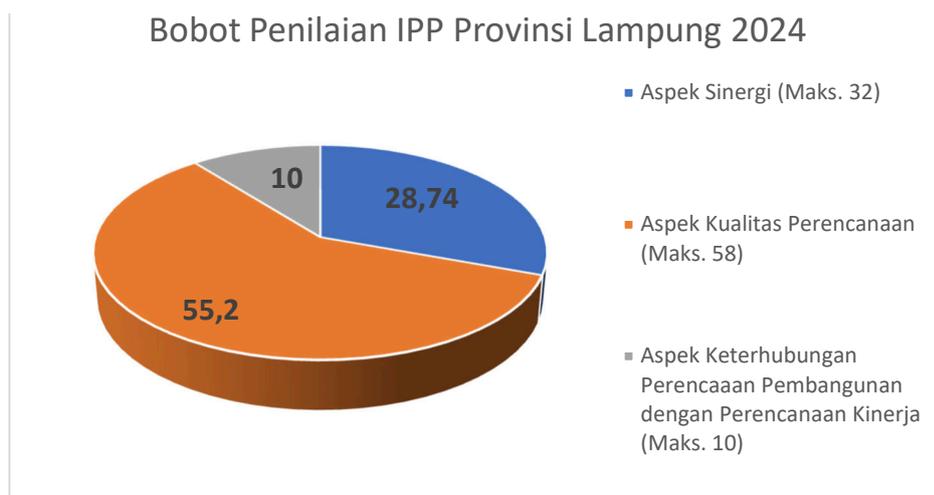
2) Kualitas Perencanaan

Perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, perlu dilakukan juga penilaian terhadap hasil akhir dari kualitas perencanaan yang dilihat dari bagaimana kesesuaian dari tiap-tiap bagiannya. Sub Komponen dari penilaian terhadap kualitas perencanaan di daerah, diukur berdasarkan:

- Kesesuaian antara Isu Strategis – Target – Program/Kegiatan/Proyek di RPJMD atau RKPD.
- Inovasi Perencanaan Pembangunan.

3) Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja
Aspek keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja berkaitan dengan bagaimana penyusunan kinerja di Pemerintah Provinsi telah disesuaikan substansinya dengan rencana pembangunan nasional. Sehingga, nantinya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dapat secara langsung berhubungan dengan usaha pencapaian pembangunan secara nasional dan tidak hanya untuk pencapaian institusinya saja.

Gambaran pencapaian Indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2024, dijabarkan pada diagram berikut :



Gambar 3.1 Bobot hasil penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2024

Dilihat dari Gambar 3.1 Disimpulkan bahwa nilai indeks perencanaan pembangunan Provinsi Lampung yang terdiri dari tiga aspek penilaian yaitu aspek sinergi, aspek kualitas perencanaan, dan aspek keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja, dari ketiga aspek tersebut telah memperoleh nilai kumulatif yang sangat tinggi yaitu 93,94 dari nilai maksimal 100. Bahkan jika ditinjau lebih jauh terhadap masing-masing komponen penilaian, untuk penilaian pada aspek keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja memperoleh nilai sempurna yaitu nilai 10 dari bobot maksimal 10. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perencanaan pembangunan di Pemerintah Provinsi Lampung sudah berjalan dengan sangat baik sesuai kriteria penilaian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

Lebih lanjut, keberhasilan kinerja perencanaan pembangunan ini tidak lepas dari upaya perbaikan yang secara kontinyu terus dilakukan oleh

Pemerintah Provinsi Lampung yang dalam hal ini BAPPEDA sebagai *leading sector* perencanaan pembangunan daerah. Perbaikan dokumen perencanaan diantaranya dokumen jangka menengah, dokumen tahunan maupun inovasi pembangunan daerah menjadi kunci keberhasilan BAPPEDA dalam memenuhi kriteria penilaian indeks perencanaan pembangunan. Pada aspek sinergi, BAPPEDA Provinsi Lampung telah berhasil menjaga keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan nasional diantaranya keselarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD dan RKPD dengan sasaran prioritas nasional RPJMN dan RKP, keselarasan target indikator makro, keselarasan komponen Standar Pelayanan Minimal (SPM) beserta targetnya, dan ketersediaan anggaran dalam mendukung program prioritas nasional. Sehingga pada aspek ini memperoleh nilai 28,74 dari bobot maksimal 32. Tentunya perbaikan terhadap akan terus dilakukan dalam upaya akselerasi penilaian aspek sinergi di masa yang datang, terutama pengoptimalan pada komponen-komponen keselarasan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD yang mendukung prioritas pembangunan dalam RKP.

Selanjutnya pada aspek kualitas perencanaan, BAPPEDA juga telah berhasil memenuhi kriteria penilaian sangat memuaskan. Kinerja aspek kualitas perencanaan ini dibuktikan dengan tingginya hasil penilaian pada komponen kesesuaian isu strategis dengan kebutuhan daerah, kesesuaian target dan sasaran pembangunan dalam menyelesaikan isu dan prioritas daerah, kesesuaian program/kegiatan/proyek dalam mencapai target dan sasaran program, keterkaitan permasalahan dengan inovasi yang dilaksanakan, dan keterkaitan output dengan outcome inovasi. Dari komponen-komponen penilaian tersebut, BAPPEDA meraih nilai 55,2 dari bobot maksimal 58. Komponen penilaian yang Penguatan terhadap komponen kesesuaian isu strategis dengan kebutuhan daerah akan menjadi perhatian pada dokumen RKPD tahun berikutnya.



Pada aspek keterhubungan dokumen perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja, telah memperoleh hasil sempurna yaitu nilai 10 dari bobot maksimal 10. Hal ini tidak lepas dari keberhasilan BAPPEDA dalam melakukan penjenjangan kinerja melalui *cascading* target pembangunan daerah menjadi target kinerja lembaga terkait di dalam pemerintah daerah.

Keberhasilan BAPPEDA Provinsi Lampung memperoleh nilai indeks perencanaan pembangunan dengan predikat sangat memuaskan ini tentunya berimplikasi positif terhadap tata kelola pemerintahan di tingkat Provinsi. Salah satu indikator pembangunan yang berdampak positif dari nilai IPP Provinsi Lampung adalah meningkatnya Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung yang semula pada tahun 2023 adalah 68,79 dengan predikat B, meningkat menjadi 82,68 dengan predikat A- di Tahun 2024. Nilai IPP, menjadi salah satu daya ungkit meningkatnya nilai Indeks RB karena nilai IPP menjadi salah satu dari 21 kegiatan utama yang dinilai dalam komponen penilaian Indeks RB sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi menjadi indikator sasaran pembangunan P RPJMD 2019-2024 pada Misi ke- 2 yaitu “Mewujudkan *“good governance”* untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik”. Indeks RB juga menjadi indikator tujuan dalam Perubahan Renstra BAPPEDA 2019-2024, sehingga dengan adanya peningkatan nilai Indeks RB ini menunjukkan keberhasilan BAPPEDA dalam mencapai target *ultimate outcome* (indikator tujuan) yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra BAPPEDA Tahun 2029-2024.



Tabel 3.6 Perbandingan Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Provinsi Lampung dengan Provinsi Regional Sumatera

No.	Provinsi	Nilai	Predikat
1.	Aceh	NA	NA
2.	Sumatera Utara	NA	NA
3.	Sumatera Barat	94,59	Sangat Memuaskan
4.	Jambi	NA	NA
5.	Riau	NA	NA
6.	Kepulauan Riau	NA	NA
7.	Bangka Belitung	NA	NA
8.	Sumatera Selatan	NA	NA
9.	Bengkulu	94,23	Sangat Memuaskan
10.	Lampung	93,94	Sangat Memuaskan

Jika ditinjau dari hasil penilaian IPP oleh BAPPENAS, Provinsi Lampung pada regional Sumatera menjadi salah satu Provinsi dengan pencapaian predikat sangat memuaskan. Ketersediaan data nilai IPP ini memang sangat terbatas, mengingat BAPPENAS selaku instansi penilai hanya merilis hasil penilaian IPP langsung kepada Provinsi terkait. Oleh karena itu Provinsi yang mengapresiasi penilaian IPP melalui kanal media sosial resmi sebagai pencapaian kinerja selain Provinsi Lampung adalah Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu, dimana pencapaian kinerja IPP ketiga Provinsi ini cenderung setara yaitu pada kisaran diatas 90 atau dengan predikat **“Sangat Memuaskan”**. Hal ini menjadi bukti kinerja perencanaan Pemerintah Provinsi Lampung yang dalam hal ini BAPPEDA sebagai institusi perencanaan, memiliki kinerja yang sangat memuaskan.

Sejalan dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SP2N) pada dasarnya bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan (selaras) dalam sistem perencanaan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan. Selain itu, dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam upaya pencapaian kinerja indikator Indeks Perencanaan Pembangunan terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat yang relatif sama dengan tahun sebelumnya begitu pula dengan solusi dalam menghadapi faktor penghambat tercapainya indikator kinerja ini, sebagaimana yang diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Faktor Pendukung dan Penghambat Tercapainya Indikator Indeks Perencanaan Pembangunan

No.	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Program/ Kegiatan yang Telah Dilaksanakan
1	Berdasarkan penilaian aspek sinergi, kualitas perencanaan dan keterhubungan antara perencanaan pembangunan dan perencanaan kinerja serta inovasi pembangunan sudah disusun dengan baik hal ini didukung oleh personal perencana di BAPPEDA Provinsi Lampung telah mumpuni.	Koordinasi dengan Pusat dan Kabupaten/Kota dalam hal sinkronisasi keselaran Indikator dan program pembangunan berpotensi mengalami kendala sehingga upaya yang dibutuhkan harus lebih intens.	Koordinasi dilakukan secara intensif dengan Pusat, Kab/Kota terkait keselasaran indikator dan program pembangunan	<p>Program/Inovasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengoptimalan layanan sinkronisasi data perencanaan pada website BAPPEDA dan website Geoportal untuk data Geospasial <p>Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Rancangan Awal Dokumen Perencanaan Pembangunan baik jangka menengah maupun tahunan 2. Melakukan Kegiatan Forum Konsultasi Publik 3. Melaksanakan MUSRENBANG 4. Melakukan desk kegiatan perangkat daerah dan kabupate/ kota dan POKIR DPRD

				5. Melakukan finalisasi dokumen perencanaan menengah dan tahunan dengan mengakomodir usulan dari stakeholder.
--	--	--	--	---

Indeks Perencanaan Pembangunan merupakan salah satu indikator kinerja utama yang menuntut adanya kualitas perencanaan yang terukur, terpadu, dan berbasis data. Untuk mendukung capaian indikator ini, Bappeda Provinsi Lampung telah mengembangkan dan mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi informasi. Salah satu bentuk implementasinya adalah penguatan layanan sinkronisasi data perencanaan melalui website Bappeda yang berfungsi sebagai pusat informasi perencanaan pembangunan daerah. Website BAPPEDA dibangun untuk memberikan informasi berupa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan BAPPEDA. Melalui website ini BAPPEDA memberikan ruang kepada PD untuk dapat melakukan konsultasi.

Website ini terintegrasi dengan PPID BAPPEDA terkait keterbukaan informasi serta Perpustakaan BAPPEDA untuk mengetahui buku-buku baru atau pun buku yang berada di BAPPEDA saat ini. Untuk dapat mengakses website BAPPEDA, stakeholder dapat mengunjungi situs www.bappeda.lampungprov.go.id.



Gambar 3.2 Website BAPPEDA Provinsi Lampung



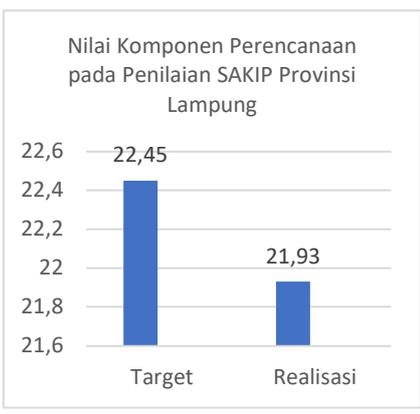
Selain itu, dukungan aplikasi juga hadir melalui Geoportal untuk data geospasial. Geoportal ini memungkinkan integrasi data spasial dengan data perencanaan pembangunan, sehingga setiap program dan kegiatan yang direncanakan dapat dipetakan secara lebih akurat berdasarkan kondisi wilayah. Melalui pemanfaatan aplikasi tersebut, IKU Indeks Perencanaan Pembangunan tidak hanya diukur dari aspek dokumen semata, tetapi juga dari sejauh mana kualitas data, sinkronisasi antarperangkat daerah, serta pemanfaatan teknologi informasi dapat mendorong terciptanya perencanaan pembangunan yang komprehensif, transparan, dan akuntabel.

2. Nilai Komponen Perencanaan pada Penilaian SAKIP Provinsi Lampung

Untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, perlu diletakkan asas-asas penyelenggaraan negara. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).



Tabel 3.8 Capaian Nilai Komponen Perencanaan pada Penilaian SAKIP Provinsi Lampung (2023-2024)

Sasaran									
Sasaran	Meningkatnya Kualitas Proses Perencanaan dan Pengukuran Pembangunan Daerah								
IKU	Nilai Komponen Perencanaan pada Penilaian SAKIP Provinsi Lampung								
Satuan	Angka								
Capaian Nilai Komponen Perencanaan pada Penilaian SAKIP Provinsi Lampung									
No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Diagram Pencapaian Komponen Perencanaan pada SAKIP Pemprov Lampung 2024				
1.	2023	-	-	-	 <p>Nilai Komponen Perencanaan pada Penilaian SAKIP Provinsi Lampung</p> <table border="1"> <tr> <td>Target</td> <td>22,45</td> </tr> <tr> <td>Realisasi</td> <td>21,93</td> </tr> </table>	Target	22,45	Realisasi	21,93
Target	22,45								
Realisasi	21,93								
2.	2024	22,45	21,93	97,6%					

Komponen perencanaan kinerja merupakan salah satu komponen dalam penilaian SAKIP. Nilai Komponen Perencanaan pada Penilaian SAKIP Provinsi Lampung pada Tahun 2024 ditargetkan sebesar 22,45 dan realisasinya adalah 21.93 atau dengan persentase 97,6% (sangat tinggi). Dari hasil evaluasi terhadap komponen perencanaan dalam nilai SAKIP Provinsi Lampung Tahun 2024, Provinsi Lampung dinilai telah berhasil menyusun perencanaan kinerja yang baik. Serangkaian dokumen perencanaan kinerja yang telah dituntaskan mencakup rencana jangka menengah telah diturunkan oleh Perangkat Daerah dalam Rencana Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja (PK), dan dokumen dokumen lain, baik pada tingkat Pemda maupun PD dan unit kerja di bawahnya dengan kualitas yang baik. Dokumen tersebut disusun secara bertingkat dengan mengacu pada visi dan misi prioritas Kepala Daerah, yang terdiri dari 6 misi, 7 tujuan, 19 sasaran, serta 20 indikator sasaran yang merupakan IKU dari Kepala Daerah.



Pemerintah Provinsi Lampung telah berhasil menyusun *logical framework* atau kerangka logis kinerja pada tingkat pemerintah daerah dan mengintegrasikannya ke dalam RPJMD 2019-2024. Penyusunan *logical framework* ini mengacu pada berbagai regulasi yang menjadi landasan hukum dalam perencanaan pembangunan daerah. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang mengatur tahapan, penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi pembangunan secara berkelanjutan.

Logical framework ini merupakan alat perencanaan yang sistematis untuk merancang, mengimplementasikan, serta mengevaluasi program dan kebijakan guna mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Kerangka ini memetakan dan merinci kinerja pada setiap misi, menghubungkannya dengan sasaran dan indikator, serta mengaitkannya dengan program-program yang dijalankan oleh masing-masing Perangkat Daerah (PD).

Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung juga telah melakukan pemetaan kontribusi dan strategi yang direncanakan dengan capaian-capaian makro pembangunan yang mencakup berbagai aspek penting seperti penanganan kemiskinan, pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, peningkatan pendapatan perkapita, pembangunan SDM, serta berbagai indikator makro lainnya. Dalam upaya memastikan perencanaan dan implementasi program berjalan efektif, Pemerintah Provinsi Lampung juga telah mengidentifikasi *cross-cutting* kinerja antar-Perangkat Daerah dalam setiap misi Kepala Daerah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi antara PD dalam mencapai sasaran pembangunan yang lebih holistik dan terintegrasi.

Meskipun *logical framework* yang telah disusun oleh Pemerintah Provinsi Lampung sudah terintegrasi dalam RPJMD 2019-2023 dan mampu memetakan keterkaitan antara misi, sasaran, indikator, serta program masing-



masing Perangkat Daerah, penyempurnaan tetap diperlukan. Penyusunan *Logical Framework* belum berdasarkan CSF (kondisi antara yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi) serta diperlukan pemetaan *leveling* kinerja yang sesuai berdasarkan hasil pemetaan CSF tersebut. Akan dilakukan juga pengawalan Indikator Kinerja Utama yang diakomodir dalam aplikasi SIMONEV.

Keberhasilan Pemerintah Provinsi Lampung dalam membangun sinergi antar-Perangkat Daerah melalui pendekatan *crosscutting* juga menjadi nilai tambah dalam memastikan bahwa pohon kinerja yang telah dirancang semakin efektif. Pemerintah Provinsi Lampung akan melakukan penyempurnaan pohon kinerja yang mengacu pada Permen PANRB Nomor 89 Tahun 2021 dengan memastikan bahwa pohon kinerja telah menjabarkan *Critical Success Factors* (CSF) sebagai aspek kunci yang berpengaruh dalam pencapaian kinerja. Hal ini bertujuan agar hubungan antara kinerja, strategi, kebijakan, serta aktivitas lintas bidang dan fungsi terkait (*crosscutting*) dapat terbangun secara optimal dan selaras. Pohon kinerja ini akan menjadi salah satu fitur dalam aplikasi SIMONEV dan E-SAKIP Provinsi Lampung. Dengan fondasi yang telah terbentuk, penyempurnaan ini bukanlah sebuah kekurangan, melainkan langkah strategis untuk mencapai kinerja yang lebih optimal dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Tabel 3.9 Capaian Nilai Komponen Perencanaan pada Penilaian SAKIP Provinsi Lampung dan Sumatera Barat (Provinsi Benchmark) Tahun 2024

Sasaran		
Sasaran	Meningkatnya Kualitas Proses Perencanaan dan Pengukuran Pembangunan Daerah	
IKU	Nilai Komponen Perencanaan pada Penilaian SAKIP Provinsi Lampung	
Satuan	Angka	
2024		Regional Benchmark (Sumatera Barat)
Target	Realisasi/Capaian	26,09
21,93	21,93/97,6%	

Berdasarkan tabel 3.5, dapat dilihat bahwa capaian Nilai Komponen Perencanaan pada Penilaian SAKIP Provinsi Lampung pada tahun 2024

mencapai angka 21,93 atau setara dengan 97,6% dari target yang telah ditetapkan. Meskipun target berhasil dicapai sepenuhnya, jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Benchmark (Sumatera Barat) yang berada pada angka 26,09, posisi Provinsi Lampung masih relatif lebih rendah. Perbedaan ini menunjukkan adanya ruang perbaikan yang perlu dilakukan, khususnya dalam meningkatkan kualitas proses perencanaan dan pengukuran pembangunan daerah. Namun demikian, pencapaian target secara penuh ini tetap menjadi bukti bahwa Provinsi Lampung telah menunjukkan konsistensi dalam perencanaan pembangunan, serta mampu menjaga akuntabilitas kinerja sesuai indikator yang ditetapkan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung memegang peranan yang sangat strategis dalam mengawal peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya pada aspek perencanaan pembangunan yang menjadi salah satu komponen utama dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam dua tahun terakhir, yakni 2023 dan 2024, peran BAPPEDA semakin menonjol sebagai motor penggerak koordinasi lintas perangkat daerah untuk memastikan bahwa seluruh dokumen perencanaan di Provinsi Lampung disusun, diimplementasikan, serta dievaluasi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SAKIP sendiri menitikberatkan pada sejauh mana perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja pemerintah daerah dapat terintegrasi dengan jelas, terukur, serta berorientasi pada hasil (outcome). Dalam konteks ini, komponen perencanaan menjadi pondasi utama, sebab kualitas perencanaan akan menentukan efektivitas implementasi program dan kegiatan, serta konsistensi antara visi pembangunan daerah dengan capaian indikator kinerja utama. Oleh karena itu, keberhasilan peningkatan nilai SAKIP di Provinsi Lampung tidak dapat dilepaskan dari peran sentral BAPPEDA

sebagai institusi perencana pembangunan yang memiliki mandat penuh dalam menyusun arah kebijakan, mengawal sinkronisasi antar dokumen, serta memastikan keterpaduan strategi lintas sektor.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung memegang peranan yang sangat strategis dalam mengawal peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya pada aspek perencanaan pembangunan yang menjadi salah satu komponen utama dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam dua tahun terakhir, yakni 2023 dan 2024, peran BAPPEDA semakin menonjol sebagai motor penggerak koordinasi lintas perangkat daerah untuk memastikan bahwa seluruh dokumen perencanaan di Provinsi Lampung disusun, diimplementasikan, serta dievaluasi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SAKIP sendiri menitikberatkan pada sejauh mana perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja pemerintah daerah dapat terintegrasi dengan jelas, terukur, serta berorientasi pada hasil (outcome). Dalam konteks ini, komponen perencanaan menjadi pondasi utama, sebab kualitas perencanaan akan menentukan efektivitas implementasi program dan kegiatan, serta konsistensi antara visi pembangunan daerah dengan capaian indikator kinerja utama. Oleh karena itu, keberhasilan peningkatan nilai SAKIP di Provinsi Lampung tidak dapat dilepaskan dari peran sentral BAPPEDA sebagai institusi perencana pembangunan yang memiliki mandat penuh dalam menyusun arah kebijakan, mengawal sinkronisasi antar dokumen, serta memastikan keterpaduan strategi lintas sektor.

Dalam periode tahun 2023 dan 2024, BAPPEDA Provinsi Lampung telah menerapkan berbagai strategi yang sistematis untuk memperbaiki kualitas perencanaan di seluruh OPD, antara lain:

1. Penguatan Penyusunan Dokumen Perencanaan

BAPPEDA memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan strategis (Renstra) dan dokumen tahunan (Renja, RKPD) yang lebih berbasis pada data, evidence-based planning, serta berorientasi hasil. Proses ini tidak hanya sebatas formalitas, tetapi juga memastikan bahwa setiap OPD mampu menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART).

2. Integrasi Perencanaan dengan Evaluasi Kinerja

Untuk memperkuat komponen perencanaan, BAPPEDA memastikan keterhubungan yang erat antara dokumen perencanaan dan hasil evaluasi. Melalui forum konsultasi perencanaan dan mekanisme reviu tahunan, BAPPEDA mengarahkan OPD agar mampu melakukan perbaikan indikator dan target sesuai rekomendasi hasil evaluasi SAKIP KemenPAN-RB maupun hasil pengawasan Inspektorat.

3. Sinkronisasi dengan Dokumen Nasional

Komponen penting lain yang dikawal BAPPEDA adalah sinkronisasi perencanaan daerah dengan kebijakan nasional, seperti RPJMN 2020–2024, RKP tahunan, serta Asta Cita Presiden. Langkah ini memastikan bahwa pembangunan di Lampung tidak berjalan sendiri, tetapi menjadi bagian integral dari agenda pembangunan nasional.

4. Pemanfaatan Sistem Informasi

Sejalan dengan perkembangan digitalisasi, BAPPEDA mendorong penggunaan SIPD-RI dan aplikasi perencanaan kinerja lainnya sebagai instrumen utama dalam menyusun, mengendalikan, dan mengevaluasi dokumen perencanaan. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat akurasi data serta konsistensi indikator antar dokumen.

5. Dampak terhadap Peningkatan Nilai SAKIP

Upaya yang dilakukan BAPPEDA terbukti memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan nilai SAKIP Provinsi Lampung, khususnya pada komponen perencanaan.

Tahun 2023, BAPPEDA berhasil memperkuat konsistensi antara dokumen RPJMD, RKPD, hingga Renja OPD. Konsistensi ini berdampak langsung pada perbaikan indikator kinerja OPD, sehingga menutup banyak celah yang sebelumnya dikoreksi dalam evaluasi KemenPAN-RB.

Tahun 2024, BAPPEDA tidak hanya menjaga konsistensi, tetapi juga meningkatkan kualitas target dan indikator yang lebih terukur, akuntabel, serta relevan dengan isu pembangunan strategis. Dengan langkah ini, perencanaan tidak lagi bersifat normatif, tetapi menjadi instrumen manajerial yang efektif untuk mengukur kinerja OPD secara nyata.

Selain itu, BAPPEDA juga berperan sebagai fasilitator utama dalam forum koordinasi antar OPD, seperti Musrenbang, forum perangkat daerah, dan rapat teknis lintas bidang, yang menghasilkan kesepakatan bersama mengenai arah kebijakan pembangunan. Semua proses ini bermuara pada peningkatan nilai SAKIP yang lebih solid, di mana komponen perencanaan menjadi motor penggerak perbaikan tata kelola pemerintahan.

6. Kolaborasi dan Peran Pembinaan

Peran BAPPEDA tidak hanya terbatas pada penyusunan dokumen, tetapi juga pada aspek pembinaan, pendampingan, dan pengawasan. Dalam kurun waktu 2023–2024, BAPPEDA secara aktif:

- Melakukan coaching clinic bagi OPD dalam menyusun indikator kinerja utama dan perjanjian kinerja.
- Memberikan bimbingan teknis terkait penyelarasan program dan kegiatan dengan outcome pembangunan.
- Menyediakan data dan analisis strategis untuk mendukung OPD dalam merumuskan target yang lebih realistis dan berbasis kebutuhan masyarakat.



Dengan pendekatan pembinaan ini, BAPPEDA menempatkan diri sebagai mitra strategis OPD, bukan sekadar pengendali. Sinergi yang terbangun menjadikan seluruh OPD lebih siap menghadapi evaluasi SAKIP dengan dukungan dokumen perencanaan yang berkualitas.

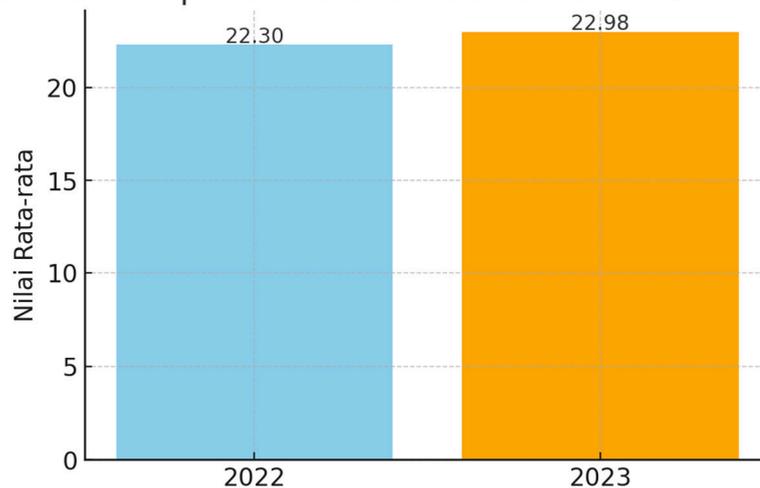
Tabel 3.10 Nilai Komponen Perencanaan pada SAKIP OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Lampung

No.	Perangkat Daerah	2023	2024
1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	24	25,5
2	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	24	21,6
3	INSPEKTORAT	24	24,6
4	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	24	25,5
5	BIRO ORGANISASI	23,4	24
6	DINAS KESEHATAN	21,6	24,6
7	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	23,1	26,1
8	DINAS TENAGA KERJA	24,6	24
9	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	22,5	24
10	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	22,5	24,6
11	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH	23,1	21,6
12	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	21	21,6
13	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	21,6	21
14	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	22,5	22,5
15	DINAS PERHUBUNGAN	22,5	24
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI	21	22,2
17	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	22,5	24,6
18	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	23,1	24
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	22,5	24,6
20	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	21,6	21
21	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK	22,5	21,6
22	DINAS SOSIAL	21,6	22,5
23	BIRO UMUM	21	24
24	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	25,5	22,5
25	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	25,5	22,5
26	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	21,6	24,6
27	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	21,6	22,2
28	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	21	21
29	DINAS KEHUTANAN	21,6	21,6
30	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	22,5	19,5

No.	Perangkat Daerah	2023	2024
31	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA	21,6	24
32	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	22,5	22,2
33	BIRO PEREKONOMIAN	22,5	25,5
34	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	24	23,7
35	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	22,17	24,6
36	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	21,6	21,6
37	BADAN PENDAPATAN DAERAH	20,7	24,9
38	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	22,5	21,8
39	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	21,6	22,2
40	BADAN PENGHUBUNG	21,6	24
41	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	21,6	19,5
42	SEKRETARIAT DPRD	21,3	24
43	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	21,6	22,2
44	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	19,8	21,9
45	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	21,6	22,2
46	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	21	23,4
47	DINAS PERKEBUNAN	21	22,2
48	BIRO HUKUM	22,2	19,5

Sumber: Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Provinsi Lampung

Rata-rata Nilai Komponen Perencanaan SAKIP OPD Provinsi Lampung



Gambar 3.3 Analisis Rata-Rata Kenaikan Komponen Perencanaan pada Penilaian SAKIP OPD Provinsi Lampung Tahun 2022-2023

Hasil analisis pada gambar 3. ini disusun untuk melihat perkembangan rata-rata nilai komponen perencanaan dalam penilaian SAKIP Perangkat

Daerah Provinsi Lampung. Perbandingan dilakukan antara tahun 2022 dan tahun 2023 dengan hasil:

- Rata-rata Tahun 2022 : 22.30
- Rata-rata Tahun 2023 : 22.98
- Kenaikan Rata-rata : 0.68 poin
- Persentase Kenaikan : 3.05%

Peningkatan nilai rata-rata sebesar 0.68 poin atau sekitar 3.05% menunjukkan adanya perbaikan kualitas komponen perencanaan pada OPD di Provinsi Lampung dari tahun 2022 ke 2023. Meskipun peningkatannya relatif moderat, tren ini menggambarkan adanya konsistensi dalam upaya perbaikan dokumen perencanaan, integrasi indikator kinerja, serta keselarasan dengan rekomendasi evaluasi KemenPAN-RB.

Adapun faktor pendukung dan penghambat tercapainya komponen perencanaan kinerja pada penilaian SAKIP Provinsi sebagai berikut :

Tabel 3.11 Faktor Pendukung dan Penghambat Tercapainya Indikator Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP

No.	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Program/Kegiatan yang Telah Dilaksanakan
1	<i>Logical Framework</i> sebagai alat perencanaan yang sistematis untuk merancang, mengimplemtasikan, serta mengevaluasi program dan kebijakan guna mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan telah disusun.	<i>Critical Success Factor (CSF)</i> sebagai kondisi antara yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi belum menjadi dasar dalam penyusunan <i>Logical Framework</i>	Pemerintah Provisnis Lampung akan melakukan penyempurnaan pohon kinerja yang mengacu pada Permen PANRB Nomor 89 Tahun 2021 dengan memastikan bahwa pohon kinerja telah menjabarkan <i>Critical Success Factors (CSF)</i> sebagai aspek kunci yang berpengaruh dalam pencapaian kinerja	Program/Inovasi: 1. Pengoptimalan layanan sinkronisasi data perencanaan pada website BAPPEDA dan website Geoportal untuk data Geospasial Kegiatan: 1. Menyusun Rancangan Awal Dokumen Perencanaan Pembangunan baik jangka menengah maupun tahunan 2. Melakukan Kegiatan Forum Konsultasi Publik 3. Melaksanakan MUSRENBANG 4. Melakukan desk kegiatan perangkatan daerah dan



No.	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Program/Kegiatan yang Telah Dilaksanakan
				kabupate/ kota dan POKIR DPRD 5. Melakukan finalisasi dokumen perencanaan menengah dan tahunan dengan mengakomodir usulan dari stakeholder

Nilai Komponen Perencanaan pada Penilaian SAKIP Provinsi Lampung mencerminkan sejauh mana kualitas dokumen perencanaan mampu mendukung pencapaian kinerja pemerintah daerah. Untuk memperkuat capaian indikator ini, Bappeda Provinsi Lampung mengoptimalkan pemanfaatan website Bappeda dan Geoportal sebagai sarana sinkronisasi data perencanaan. Website Bappeda berfungsi sebagai media dokumentasi, publikasi, dan keterbukaan informasi yang menyediakan akses terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah. Melalui platform ini, setiap perangkat daerah dapat mengakses rencana pembangunan yang telah ditetapkan, sehingga memudahkan proses sinkronisasi antar-OPD.

Sementara itu, Sistem Informasi Geoportal Lampung berfungsi untuk berbagi Informasi Geospasial Dasar dan Informasi Geospasial Tematik serta Data dan Informasi lainnya terkait data spasial yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Sistem ini juga berfungsi sebagai media untuk berbagipakai data spasial sesuai mekanisme yang tertuang dalam Pergub Lampung Nomor 37 Tahun 2022 tentang perubahan atas Pergub Lampung Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Lampung. Pencari data dapat langsung mengakses data pembangunan dan kewilayahan berbasis data spasial melalui situs www.geoportal.lampungprov.go.id





Gambar 3.4 Website Geoportal Lampung

Optimalisasi layanan berbasis aplikasi tersebut berkontribusi langsung pada peningkatan nilai komponen perencanaan dalam penilaian SAKIP. Hal ini karena perencanaan yang disusun tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga memperlihatkan kualitas data, keterpaduan lintas sektor, dan orientasi hasil yang lebih akuntabel.

3. Nilai Komponen Pengukuran pada Penilaian SAKIP Provinsi Lampung

Pengukuran Kinerja dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan unit kerjanya secara berkala atas realisasi kinerja dan rencana aksi pada seluruh PD. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/413/VI.01/HK/2024 tentang Petunjuk Teknis Peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Aspek Pengukuran Kinerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung menjadi pedoman pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang digunakan di level Pemda maupun unit kerja.

Tabel 3.12 Capaian Nilai Komponen Pengukuran pada Penilaian SAKIP Provinsi Lampung (2023-2024)

Sasaran									
Sasaran		Meningkatnya Kualitas Proses Perencanaan dan Pengukuran Pembangunan Daerah							
IKU		Nilai Komponen Pengukuran pada Penilaian SAKIP Provinsi Lampung							
Satuan		Angka							
Capaian Nilai Komponen Pengukuran pada Penilaian SAKIP Provinsi Lampung									
No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Grafik Pencapaian TPT Pemprov Lampung 2024				
1.	2023	-	-	-	 <p>Nilai Komponen Pengukuran pada Penilaian SAKIP Provinsi Lampung</p> <table border="1"> <tr> <td>Target</td> <td>19,05</td> </tr> <tr> <td>Realisasi</td> <td>18,44</td> </tr> </table>	Target	19,05	Realisasi	18,44
Target	19,05								
Realisasi	18,44								
2.	2024	19,05	18,44	96,7%					

Sumber: BAPPEDA, 2025

Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP terdiri dari Keberadaan Pengukuran Kinerja, Kualitas/Mutu Pengukuran Kinerja, dan Pemanfaatan Pengukuran Kinerja. Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP Provinsi Lampung target realisasinya sebesar 19,05 dan realisasinya adalah 18,44 atau dengan persentase 96,7%.

BAPPEDA Provinsi Lampung telah mengembangkan aplikasi SIMONEV sebagai sarana monitoring dan evaluasi kinerja sehingga transparansi dan akuntabilitas dalam pencapaian kinerja dapat terjaga. Akan dilakukan pengembangan aplikasi SIMONEV yang memuat data capaian kinerja dimulai dari IKU Provinsi Lampung, IKU PD, program/kegiatan/sub kegiatan. Selain itu, akan ditambahkan fitur yang memungkinkan perangkat daerah untuk memberikan *feedback* atau upaya perbaikan terkait kinerja yang tidak/belum tercapai dalam triwulan tertentu.

Pemerintah Provinsi Lampung telah berhasil mengembangkan aplikasi SIMONEV yang terintegrasi dengan e-SAKIP Provinsi Lampung sebagai alat

utama dalam pengumpulan data kinerja, mencakup data target, realisasi kinerja, dan anggaran untuk program, kegiatan, serta sub-kegiatan. Aplikasi ini dirancang untuk mendukung pencapaian Prioritas Daerah, IKU Provinsi Lampung, serta IKU Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (IKD), sehingga mempermudah pemantauan kinerja secara sistematis dan terstruktur.

Saat ini, aplikasi SIMONEV masih dalam tahap pengembangan lebih lanjut, termasuk proses integrasi dengan aplikasi SIPPKD. Oleh karena itu, evaluasi kinerja pada tahun 2024 masih dilakukan secara manual. Meskipun demikian, keberadaan SIMONEV telah menjadi fondasi penting dalam sistem monitoring dan evaluasi yang lebih terarah. Ke depan, optimalisasi aplikasi ini akan terus dilakukan agar dapat memberikan laporan evaluasi kinerja yang lebih komprehensif, termasuk untuk TW I dan TW II, sehingga memastikan proses monitoring dan evaluasi berjalan semakin efektif dan akurat.

Perbandingan capaian Nilai Komponen Pengukuran pada Penilaian SAKIP Provinsi Lampung dan Sumatera Barat (Provinsi Benchmark) pada tahun 2024 disajikan sebagai bahan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan daerah. Perbandingan ini penting karena mampu menjadi tolok ukur dalam melihat sejauh mana kualitas proses perencanaan dan pengukuran. Lebih lanjut, komponen pengukuran PROVINSI LAMPUNG dan SUMATERA BARAT sebagai berikut:

Tabel 3.13 Capaian Nilai Komponen Pengukuran pada Penilaian SAKIP Provinsi Lampung dan Sumatera Barat (Provinsi Benchmark) Tahun 2024

Sasaran		
Sasaran	Meningkatnya Kualitas Proses Perencanaan dan Pengukuran Pembangunan Daerah	
IKU	Nilai Komponen Pengukuran pada Penilaian SAKIP Provinsi Lampung	
Satuan	Angka	
2024		Regional Benchmark (Sumatera Barat)
Target	Realisasi/Capaian	21,95
19,05	18,44/96,7%	

Sumber: BAPPEDA, 2025

Berdasarkan tabel 3.5, capaian nilai komponen pengukuran SAKIP Provinsi Lampung tahun 2024 tercatat sebesar 18,44 atau 96,7% dari target yang ditetapkan sebesar 19,05. Meskipun target hampir tercapai, nilai ini masih berada di bawah capaian Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 21,95. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa meskipun kinerja perencanaan di Provinsi Lampung sudah cukup baik, masih terdapat kesenjangan yang perlu diatasi agar dapat menyamai bahkan melampaui capaian Sumatera Barat. Hal ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah Provinsi Lampung untuk memperkuat kualitas perencanaan, meningkatkan ketepatan indikator kinerja, serta memperdalam analisis berbasis data dalam dokumen perencanaan.

Selanjutnya, untuk melihat lebih rinci perkembangan capaian kinerja, perlu ditinjau nilai komponen pengukuran pada masing-masing perangkat daerah di Provinsi Lampung sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.14 Nilai Komponen Pengukuran pada SAKIP OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Lampung

No.	Perangkat Daerah	2023	2024
1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	24	24,6
2	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	24	21
3	INSPEKTORAT	22,5	24
4	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	22,5	21,3
5	BIRO ORGANISASI	23	22,5
6	DINAS KESEHATAN	22,2	21,6
7	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	22,5	20,4
8	DINAS TENAGA KERJA	21,6	22,5
9	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	21,6	21
10	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	21,6	21,6
11	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH	22,5	24
12	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	23,4	21,9
13	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	21,9	21
14	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	21,6	21,6
15	DINAS PERHUBUNGAN	21	24



No.	Perangkat Daerah	2023	2024
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI	21	21
17	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	21	21
18	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	19,2	22,25
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	21	21
20	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	21	21
21	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK	21,6	21
22	DINAS SOSIAL	22,5	21
23	BIRO UMUM	21	23,4
24	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	22,5	19,5
25	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	22,5	21
26	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	21	21
27	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	21,9	21
28	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	21,6	21
29	DINAS KEHUTANAN	22,5	21,6
30	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	20,1	21
31	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA	21	22,2
32	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	21	20,1
33	BIRO PEREKONOMIAN	21	20,1
34	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	24	24
35	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	21	20,1
36	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	21	21
37	BADAN PENDAPATAN DAERAH	21	22,5
38	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	20,1	21
39	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	20,1	21
40	BADAN PENGHUBUNG	21	21
41	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	21	20,4
42	SEKRETARIAT DPRD	18	20,1
43	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	21,6	18,9
44	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	21	18
45	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	18,6	21
46	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	19,2	18,6
47	DINAS PERKEBUNAN	20,1	18,9
48	BIRO HUKUM	21	18,9

Sumber: Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Provinsi Lampung





Gambar 3.5 Analisis Rata-rata Kenaikan Komponen Pengukuran Pada Penilaian SAKIP OPD Provinsi Lampung Tahun 2022-2023

Berdasarkan hasil evaluasi, nilai rata-rata komponen pengukuran SAKIP OPD Provinsi Lampung pada tahun 2022 mencapai **62,24**, namun pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan menjadi **62,07**. Secara angka, penurunan ini terlihat kecil yaitu hanya **0,17 poin**, tetapi dalam perspektif akuntabilitas kinerja pemerintahan, perubahan kecil sekalipun patut mendapat perhatian. Hal ini karena pengukuran kinerja merupakan inti dari sistem SAKIP yang menentukan apakah program, kegiatan, dan anggaran yang dikelola pemerintah benar-benar memberikan output yang nyata bagi Pembangunan Daerah.

Dengan adanya penurunan ini, dapat disimpulkan bahwa kinerja pengukuran di sebagian OPD belum menunjukkan tren positif, bahkan cenderung stagnan. Kondisi ini tentu tidak diharapkan, mengingat pengukuran kinerja merupakan salah satu aspek penting yang dinilai langsung oleh KemenPAN-RB dan berpengaruh pada penilaian akuntabilitas pemerintah daerah secara keseluruhan. Jika dianalisis lebih lanjut, penurunan tersebut disebabkan oleh:

1. Kualitas Indikator yang Belum Optimal

Masih terdapat indikator kinerja yang belum sepenuhnya terukur, jelas, dan berorientasi pada outcome. Sebagian besar indikator masih bersifat output administratif, sehingga sulit untuk menilai manfaat nyata program pemerintah bagi masyarakat. Akibatnya, capaian kinerja terlihat tidak signifikan meskipun program telah berjalan

2. Validitas Data yang Lemah

Pengumpulan data kinerja di beberapa OPD masih dilakukan secara manual dan belum seragam. Hal ini menimbulkan potensi keterlambatan input, perbedaan tafsir, serta keraguan terhadap validitas data yang disajikan. Ketika data tidak konsisten, maka laporan kinerja menjadi kurang dapat dipercaya.

3. Monitoring dan Evaluasi yang Kurang Efektif

Meskipun kegiatan monitoring dan evaluasi telah rutin dilaksanakan, praktiknya masih dominan bersifat administratif. Evaluasi lebih banyak berfokus pada kelengkapan dokumen, bukan pada analisis dampak program. Akibatnya, hasil evaluasi tidak mampu menjadi dasar perbaikan yang kuat bagi perencanaan tahun berikutnya.

4. Kapasitas SDM yang Terbatas

Tidak semua OPD memiliki staf yang benar-benar memahami metodologi SAKIP, khususnya dalam hal penyusunan indikator, cascading IKU, hingga pelaporan berbasis hasil. Rotasi pegawai yang cukup tinggi juga berdampak pada hilangnya kesinambungan pengetahuan, sehingga setiap tahun OPD harus “belajar ulang”.

5. Keterhubungan dengan Anggaran Belum Kuat

Masih ditemukan adanya kesenjangan antara indikator kinerja dengan alokasi anggaran. Beberapa indikator tidak memiliki dukungan anggaran yang memadai, sementara ada juga program dengan anggaran besar

namun tidak memiliki indikator hasil yang kuat. Hal ini menyebabkan capaian kinerja tidak maksimal.

6. Adaptasi terhadap Regulasi dan Sistem Baru

Penerapan SIPD-RI dan adanya pembaruan regulasi dari KemenPAN-RB menuntut seluruh OPD untuk cepat beradaptasi. Namun kecepatan adaptasi ini tidak sama antar-OPD. Beberapa OPD masih menghadapi kesulitan teknis dalam menggunakan sistem dan memahami format baru yang diwajibkan.

Implikasi dari Penurunan rata-rata nilai komponen pengukuran meskipun hanya 0,17 poin tetap membawa implikasi penting:

1. Pertama, penurunan ini menjadi sinyal bahwa konsistensi kinerja belum terjaga dengan baik.
2. Kedua, rendahnya kualitas pengukuran kinerja berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah, karena indikator yang tidak jelas akan menghasilkan kebijakan yang tidak tepat sasaran.
3. Ketiga, nilai evaluasi SAKIP provinsi secara keseluruhan bisa berdampak negatif, sebab agregasi nilai OPD sangat menentukan hasil akhir penilaian KemenPAN-RB.
4. Keempat, jika kondisi ini tidak segera diatasi, maka tingkat kepercayaan publik terhadap akuntabilitas pemerintah daerah dapat menurun.
5. Mengurangi Akuntabilitas Publik. Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana kinerja pemerintah memberikan dampak nyata. Penurunan nilai pengukuran bisa mengurangi tingkat kepercayaan publik.

Menyadari pentingnya aspek pengukuran dalam sistem akuntabilitas kinerja, Bappeda Provinsi Lampung sebagai koordinator utama perencanaan pembangunan daerah telah menempatkan peningkatan kualitas komponen pengukuran sebagai salah satu prioritas strategis. Hal ini didorong oleh kesadaran bahwa kualitas pengukuran yang akurat, konsisten, dan relevan akan sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan

serta pencapaian tujuan strategis daerah. Oleh karena itu, berbagai langkah perbaikan telah dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk memastikan seluruh OPD mampu menyajikan data kinerja yang terukur, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu langkah yang menonjol adalah **penguatan instrumen SIMONEV**, sebuah aplikasi berbasis elektronik yang dirancang khusus sebagai sarana pelaporan dan pemantauan kinerja. Bappeda Provinsi Lampung tidak hanya membangun sistem ini, tetapi juga terus melakukan penyempurnaan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan OPD. Dengan SIMONEV, data capaian kinerja dapat dihimpun secara lebih cepat, terintegrasi, dan mudah diakses. Keunggulan lain dari aplikasi ini adalah kemampuannya dalam menghasilkan analisis berbasis data (*data-driven analysis*), sehingga pengambilan keputusan terkait perencanaan, penganggaran, maupun evaluasi dapat dilakukan dengan landasan yang lebih objektif.

Selain itu, Bappeda secara konsisten menyelenggarakan **forum evaluasi kinerja triwulanan**. Forum ini tidak sekadar menjadi ruang untuk menyampaikan laporan, tetapi juga arena dialog interaktif antara Bappeda dan OPD dalam menilai progres capaian indikator kinerja. Melalui forum tersebut, setiap OPD mendapatkan kesempatan untuk memaparkan keberhasilan, mengidentifikasi hambatan, sekaligus menerima rekomendasi strategis untuk perbaikan. Mekanisme evaluasi ini berfungsi sebagai *early warning system* sehingga potensi keterlambatan atau ketidaktercapaian target dapat segera diantisipasi.

Upaya lainnya adalah melalui **pendampingan teknis (coaching clinic)** yang diberikan Bappeda kepada OPD. Pendampingan ini meliputi penyusunan indikator kinerja yang memenuhi prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*), penjabaran cascading IKU hingga ke level sub-kegiatan, serta tata cara pelaporan yang lebih menekankan pada outcome, bukan sekadar output. Dengan adanya coaching clinic, kualitas

SDM perencana di OPD semakin meningkat, yang pada akhirnya berkontribusi langsung terhadap kualitas data pengukuran kinerja.

Lebih jauh, Bappeda juga menekankan pentingnya **sinkronisasi indikator kinerja**. Seluruh indikator kinerja OPD diarahkan agar selaras dengan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung, dokumen RPJMN, serta Asta Cita Presiden. Sinkronisasi ini bertujuan agar indikator kinerja tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan menjadi satu kesatuan yang mendukung arah pembangunan nasional dan daerah. Dengan demikian, setiap indikator yang digunakan memiliki nilai strategis dan relevansi tinggi, sekaligus mampu memperkuat posisi daerah dalam sistem perencanaan nasional.

Tak kalah penting, Bappeda mendorong **integrasi antar perencanaan, penganggaran, dan pelaporan**. Melalui koordinasi lintas perangkat daerah, Bappeda memastikan bahwa setiap indikator kinerja benar-benar terkait dengan program yang dibiayai melalui APBD. Hal ini memberikan jaminan bahwa capaian kinerja dapat diukur secara rasional dan tidak terlepas dari alokasi sumber daya yang tersedia. Dengan adanya integrasi ini, pengukuran kinerja menjadi lebih transparan, logis, serta berorientasi pada hasil pembangunan yang nyata dirasakan masyarakat.

Langkah-langkah tersebut membuktikan bahwa meskipun terdapat penurunan nilai komponen pengukuran pada tahun 2023, Bappeda Provinsi Lampung telah mengambil langkah-langkah yang bersifat *corrective action* dan *continuous improvement*. Upaya yang dilakukan tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi juga menyentuh aspek kelembagaan, koordinasi lintas sektor, dan penguatan kapasitas SDM. Hal ini menunjukkan komitmen kuat Bappeda untuk menjaga konsistensi akuntabilitas kinerja, sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Provinsi Lampung. Dengan pendekatan yang terukur, sistematis, dan berkesinambungan tersebut, diharapkan kualitas pengukuran kinerja pada

seluruh OPD akan terus meningkat, sehingga ke depan dapat mendukung tercapainya visi pembangunan daerah yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.

Faktor pendukung dan penghambat tercapainya indikator pengukuran kinerja pada penilaian SAKIP adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15 Faktor Pendukung dan Penghambat Tercapainya Indikator Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP

No.	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Program/Kegiatan yang Telah Dilaksanakan
1.	Pemerintah Provinsi Lampung telah berhasil mengembangkan aplikasi pengukuran kinerja (SIMONEV) yang terintegrasi dengan e-SAKIP Provinsi Lampung sebagai alat utama dalam pengumpulan data kinerja, mencakup data target, realisasi kinerja, dan anggaran untuk program, kegiatan, serta sub-kegiatan. Aplikasi ini dirancang untuk mendukung pencapaian Prioritas Daerah, IKU Provinsi Lampung, serta IKU Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (IKD), sehingga	<i>Tools</i> pada aplikasi belum menyediakan feedback terhadap kinerja Perangkat Daerah dan masih perlu penyempurnaan terhadap fitur-fitur pada aplikasi SIMONEV	Optimalisasi aplikasi ini akan terus dilakukan agar dapat memberikan laporan evaluasi kinerja yang lebih komprehensif, termasuk untuk TW I dan TW II, sehingga memastikan proses monitoring dan evaluasi berjalan semakin efektif dan akurat	Program/Inovasi: 1. Aplikasi Pengukuran Kinerja SIMONEV Kegiatan: 1. Memastikan konsistensi antara Perencanaan dan Penganggaran, dalam hal ini kesesuaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Dokumen DPA APBD. 2. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah, meliputi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Lokasi dan Pagu Indikatif. 3. Mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana serta kendala yang dihadapi. 4. Memastikan bahwa indikator kinerja program, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana indikatif kegiatan Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dicapai, berkontribusi dalam pencapaian target kinerja (Renstra/IKD)

No.	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Program/Kegiatan yang Telah Dilaksanakan
	mempermudah pemantauan kinerja secara sistematis dan terstruktur			Perangkat Daerah serta pencapaian IKU RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Nilai Komponen Pengukuran pada Penilaian SAKIP Provinsi Lampung menekankan pentingnya akurasi, keterpaduan, dan konsistensi dalam mengukur capaian kinerja pemerintah daerah. Untuk mendukung indikator ini, Bappeda Provinsi Lampung menggunakan **aplikasi SIMONEV (Sistem Monitoring dan Evaluasi)** sebagai instrumen utama pengukuran kinerja. Aplikasi ini dirancang untuk menghimpun data capaian kinerja dari seluruh perangkat daerah secara elektronik, sehingga proses pelaporan menjadi lebih sistematis, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sistem monitoring dan evaluasi program pembangunan (SIMONEV) dikembangkan untuk mempermudah PD dalam melaporkan pelaksanaan kegiatan dan penilaian kinerja setiap PD. Sistem ini sangat mendukung dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan Pemerintah Daerah, sehingga kegiatan monitoring dan evaluasi dapat lebih mudah dilakukan secara transparan dan akuntabel;

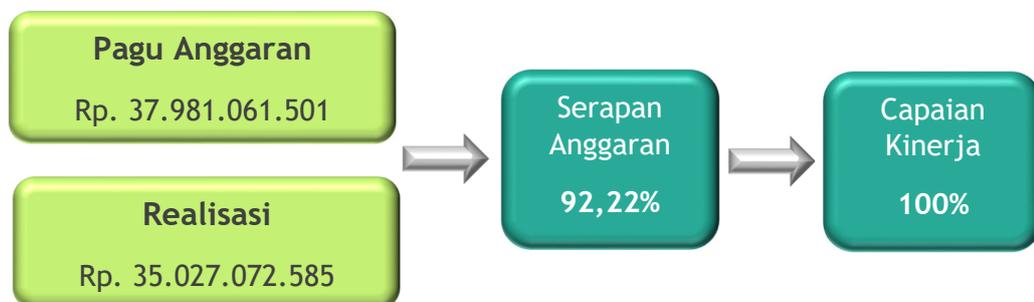


Gambar 3.6 Website Simonev BAPPEDA Provinsi Lampung

Dengan penerapan SIMONEV, pengukuran kinerja tidak lagi hanya bersifat administratif, melainkan mampu memberikan gambaran objektif mengenai sejauh mana program dan kegiatan pemerintah daerah berkontribusi pada pencapaian sasaran strategis. Hal ini menjadi salah satu faktor kunci dalam peningkatan nilai komponen pengukuran pada penilaian SAKIP Provinsi Lampung, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan transparansi kinerja pembangunan daerah.

3.4 Akuntabilitas Keuangan dan Realisasi Tahun 2024

Berdasarkan APBD Perubahan Tahun 2024, anggaran yang mendukung tercapainya Indikator Sasaran BAPPEDA yaitu Rp. 37.981.061.501. Adapun Realisasi Keuangan sebesar Rp. 35.027.072.585,- (92,22%). Efektifitas serapan anggaran terhadap realisasi kinerja yang mencapai 100% adalah implikasi positif dari efisiensi anggaran yang telah dilakukan pada Tahun 2024. Secara rinci realisasi keuangan terhadap capaian kinerja BAPPEDA pada Tahun 2024 disajikan pada gambar berikut:



Gambar 3.7 Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

Dari gambar diatas dijelaskan bahwa realisasi kinerja mencapai 100% dan realisasi anggaran mencapai 92,22%, termasuk dalam kategori sangat tinggi. Dari 57 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Lampung pada Tahun 2024, seluruhnya mencapai realisasi kinerja 100%. Berikut detail anggaran tersebut:



Tabel 3.16 Akuntabilitas Keuangan dan Realisasi Tahun 2024

IKU	Pagu P-APBD 2024 (Rp)	Realisasi P-APBD 2024 (Rp)	Capaian (%)
Indeks Perencanaan Pembangunan	5.188.388.600	4.481.537.161	90,04%
Nilai Komponen Perencanaan pada Penilaian SAKIP Provinsi Lampung	5.174.652.800	4.564.475.557	87,12%
Nilai Komponen Pengukuran pada Penilaian SAKIP Provinsi Lampung	1.134.273.700	934.015.089	76,60%
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.483.746.400,79	25.047.044.778	90,38%
TOTAL	37.981.061.501	35.027.072.585	

Sumber: Evaluasi Renja, 2024

Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 BAPPEDA Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.17 Target Kinerja, Target Capaian dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
		Rp	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Indeks Perencanaan Pembangunan		5.188.388.600	4.481.537.161	90,04%
PERENCANAAN				
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	5.188.388.600	4.481.537.161	90,04%
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	1.854.852.600	1.699.842.266	94,69%
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah berita acara Konsultasi Publik	84.054.000	83.474.400	99,31%
Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah berita acara Musrenbang Provinsi	555.292.200	529.306.550	95,32%
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi yang ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD) dan Dokumen Manajemen Risiko RKPD Tahun 2025 dan Naskah Akademik Penyusunan Ranperda RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029	1.215.506.400	1.087.061.316	89,43%
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan	1.472.751.400	1.413.690.333	97,79%
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masukan data dan informasi serta keterisian E-Database N-1	200.000.000	197.355.200	98,68%



PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
		Rp	Rp	%
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah sumber daya manusia Pemerintah Provinsi/SKPD yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi Geospasial	305.598.200	305.538.940	99,98%
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi Geospasial	78.626.800	77.614.700	98,71%
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil pembangunan daerah yang diterbitkan, Dokumen Satu Data Indonesia (SDI) dan Buku Sejarah Pembangunan Lampung	888.526.400	833.181.493	93,77%
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja pembangunan daerah di OPD dan Kabupaten/ Kota	1.551.152.600	1.082.646.108	74,42%
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (TP) Tahun 2023 dan Laporan Dana DAK Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2023	194.262.200	140.387.545	72,27%
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Evaluasi RKPD Tahun 2023, Laporan Monev Program dan Kegiatan APBD Tahun 2024, Laporan Capaian Kinerja 10 Indikator Pj Gubernur	900.200.000	512.822.869	56,97%
Fasilitasi/ Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen hasil fasilitasi RKPD Tahun 2025 dan Dokumen hasil fasilitasi Perubahan RKPD Kabupaten/ Kota Tahun 2024	456.690.400	429.435.694	94,03%
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan dokumen data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	309.632.000	285.358.454	93,26%



PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
		Rp	Rp	%
Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen pengelolaan data pembangunan daerah dalam SIPD	125.000.000	122.346.340	97,88%
Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	119.528.000	97.913.279	81,92%
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen e-walidata SIPD	65.104.000	65.098.835	99,99%
Nilai Komponen Perencanaan pada Penilaian SAKIP Provinsi Lampung		5.174.652.800	4.564.475.557	87,12%
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	5.174.652.800	4.564.475.557	87,12%
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia	1.637.768.300	1.627.704.943	99,55%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi dalam penyusunan perencanaan daerah di lingkup pembangunan perencanaan pemerintah	153.615.200	153.153.179	99,70%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah perangkat daerah yang diasistensi Renstra/ Renja nya dan penyusunan	75.538.800	75.271.000	99,65%

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
		Rp	Rp	%
Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen kebijakan peningkatan IPM berdasarkan komposit pendidikan dan dokumen Grand Design Kependudukan			
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Rancangan Aksi Daerah Pangan Gizi 2024-2029	257.465.500	256.914.900	99,79%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung Tahun 2025	540.704.200	538.803.664	99,65%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah perangkat daerah yang di Asistensi Renstra/ Renja nya dan penyusunan dokumen asistensi perencanaan terkait pembangunan manusia	133.186.800	133.086.900	99,92%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah Kemiskinan dan Rencana Aksi Daerah SDGs Tahun 2025-2030	477.257.800	470.475.300	98,58%
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan bidang perekonomian dan SDA	1.792.996.400	1.458.195.944	77,24%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Buku Peluang Investasi Provinsi Lampung	426.521.400	391.080.650	91,69%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah perangkat daerah yang diasistensi Renstra/ Renja nya dan penyusunan	287.003.800	271.110.764	94,46%

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
		Rp	Rp	%
Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen Dokumen Target Indikator Makro Ekonomi Provinsi Lampung			
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Kajian Industrialisasi di Provinsi Lampung dan Dokumen Rencana Aksi Pengendalian Inflasi di Provinsi Lampung	378.494.000	320.142.600	84,58%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Dana Bagi Hasil Sawit dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau DBH-CHT	374.796.400	282.706.658	75,43%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat daerah yang diasistensi Renstra/ Renja nya dan penyusunan Dokumen asistensi pembangunan sektor pertanian, perikanan, perkebunan di Provinsi Lampung (e-KPB)	207.038.000	125.942.356	60,83%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan potensi dan pengembangan pembangunan daerah sektor koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata	119.142.800	67.212.916	56,41%
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.743.888.100	1.478.574.670	84,58%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Bidang Perencanaan Infrastruktur Kewilayahan	328.754.000	277.879.500	84,53%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah perangkat daerah yang diasistensi Renstra/ Renja nya dan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Program	307.994.000	219.386.430	71,23%



PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
		Rp	Rp	%
Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Prioritas Perangkat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024			
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	99.962.000	84.628.000	84,66%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	Jumlah Dokumen Profil Infrastruktur Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Keciptakarya Provinsi Lampung	354.815.600	307.180.700	86,57%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah perangkat daerah yang diasistensi Renstra/ Renja nya dan penyusunan Dokumen Asistensi di sektor perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.	154.835.500	139.424.490	90,05%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PEP PRKBI) Provinsi Lampung dan Dokumen Sinkronisasi Kebijakan Rencana Program (KRP) Untuk KLHS RPJPD	497.527.000	450.075.550	90,46%
Nilai Komponen Pengukuran pada Penilaian SAKIP Provinsi Lampung		1.134.273.700	934.015.089	76,60%
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan	1.134.273.700	934.015.089	76,60%

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
		Rp	Rp	%
	Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah			
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia	555.290.500	552.633.422	99,52%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi Renstra/ Renja nya, Dokumen Capaian TPB/SDG Tahun 2023 dan Laporan Hasil Monev	219.528.500	218.440.307	99,50%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi Renstra/ Renja nya dan penyusunan Laporan Pangan Gizi Provinsi Lampung Tahun 2023 serta Laporan LP2KD Provinsi Lampung Tahun 2023, Laporan Hasil Monev	335.762.000	334.193.115	99,53%
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan bidang perekonomian dan SDA	379.779.000	227.780.847	59,02%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi Renstra/ Renja nya dan Buku Statistik Perekonomian (tahunan n-1) serta Laporan Hasil Monev	211.185.000	142.719.778	67,58%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi Renstra/ Renja nya dan penyusunan okumen monev dan capaian kinerja perencanaan di sektor pertanian, perkebunan, kelautan, dan	168.594.000	85.061.069	50,45%

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
		Rp	Rp	%
	perikanan, dan dokumen laporan hasil rapat koordinasi dan implementasi KPB dan Laporan Hasil Monev			
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	199.204.200	153.600.820	76,12%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi Renstra/ Renja nya dan penyusunan Dokumen capaian pembangunan bidang infrastruktur (Renja tahun 2024 dan RPJMD tahun 2019-2024) untuk Dinas BMBK, Dinas Perhubungan, Dinas ESDM dan Balitbangda serta Laporan Hasil Monev	95.000.000	52.027.000	54,77%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi Renstra/ Renja nya dan penyusunan Dokumen Data spasial dan peta tematik berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahaan dan Laporan Hasil Monev	104.204.200	101.573.820	97,48%
PERENCANAAN				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	26.483.746.400,79	25.047.044.778	90,38%
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan dan Evaluasi perangkat daerah yang tepat waktu	441.338.611	354.479.300	81,57%



PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
		Rp	Rp	%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra, Renja Murni (n+1), Perubahan Renja (Tahun n), RKT, DPA Murni dan DPA Perubahan, Rencana Aksi, PK Murni, Perubahan PK, GAP, GBS, Manajemen Risiko, Peta Proses Bisnis)	288.119.811	223.223.700	77,48%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (LKj, Ev. Renstra, Ev. Renja, Ev. Rencana Aksi, Evaluasi Hasil Renja Triwulan)	153.218.800	131.255.600	85,67%
Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan dokumen penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	20.872.259.240	20.072.239.253	95,53%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20.765.554.339,79	19.970.995.253	96,17%
Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	106.704.900	101.244.000	94,88%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen kebutuhan barang dan aset yang tepat waktu	86.447.000	82.434.200	95,36%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada PD	86.447.000	82.434.200	95,36%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kompetensi ASN Perangkat Daerah	461.255.000	404.965.500	89,53%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	186.908.000	184.388.000	98,65%



PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
		Rp	Rp	%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	274.347.000	220.577.500	80,40%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan administrasi umum perkantoran	1.882.840.300	1.624.293.300	85,82%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	425.337.000	409.744.000	96,33%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	39.124.500	35.855.700	91,65%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	40.368.000	28.267.300	70,02%
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	44.738.400	44.738.400	100,00%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	192.924.000	139.168.000	72,14%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1.140.348.400	966.519.900	84,76%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang penunjang urusan Pemerintah Daerah	133.573.100	126.150.000	94,44%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	133.573.100	126.150.000	94,44%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang perkantoran	1.901.353.873	1.736.028.624	86,43%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	350.640.000	302.691.124	86,33%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	50.646.000	40.579.000	80,12%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1.500.067.873	1.392.758.500	92,85%



PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
		Rp	Rp	%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perkantoran	704.679.277	646.454.601	94,40%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	411.545.000	356.395.601	86,60%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	27.800.000	27.100.000	97,48%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung BAPPEDA dan interior Ruang Kepala dan Ruang Sekretariat	265.334.277	262.959.000	99,10%
TOTAL		37.981.061.501	35.027.072.585	92,22%

Sumber: Evaluasi Renja, 2024



Pada tahun 2024, Indeks Perencanaan Pembangunan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp5,18 miliar dengan realisasi Rp4,48 miliar atau 90,04%. Meskipun serapan anggaran tidak mencapai 100%, target kinerja tetap tercapai sehingga penggunaan anggaran dapat dikategorikan efisien dan efektif.

Untuk Nilai Komponen Perencanaan pada Penilaian SAKIP Provinsi Lampung, anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5,17 miliar terealisasi Rp4,56 miliar atau 87,12%. Penyerapan anggaran lebih rendah dari pagu awal, namun kegiatan yang dilaksanakan tetap berkontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas perencanaan, sehingga efektivitas kinerja tetap terjaga.

Sementara itu, Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP Provinsi Lampung dialokasikan sebesar Rp1,13 miliar dengan realisasi Rp934 juta atau 76,60%. Walaupun tingkat serapan anggarannya lebih rendah, capaian indikator tetap mendukung penilaian SAKIP secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi anggaran berjalan seiring dengan efektivitas pencapaian kinerja.

3.5 Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Realisasi kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung pada Tahun 2024 mencapai 100% dan realisasi anggaran mencapai 92,22%, Secara rinci capaian kinerja dan anggaran masing-masing sub kegiatan dapat dilihat dalam matriks evaluasi renja dalam lampiran dokumen evaluasi renja Tahun 2024. Penjelasan terkait tingkat capaian anggaran selama tahun 2024 sebagai berikut:



Tabel 3.18 Realisasi Kinerja dan Anggaran BAPPEDA Tahun 2024

No	IKU Prog/Keg S.Keg	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian %	Pagu	Realisasi (Rp.)	%
1	INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN	82	93,94	114,00%	5.188.388.600	4.481.537.161	90,04%
2	NILAI KOMPONEN PERENCANAAN KINERJA PADA PENILAIAN SAKIP PROVINSI	22,45	21,93	97,60%	5.174.652.800	4.564.475.557	87,12%
3	NILAI KOMPONEN PENGUKURAN KINERJA PADA PENILAIAN SAKIP PROVINSI	19,05	18,44	96,70%	1.134.273.700	934.015.089	78,22%
4	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				26.483.746.400,79	25.047.044.778	90,38%
TOTAL					37.981.061.501	35.027.072.585	92,22%

Kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2024 secara umum menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat baik, di mana seluruh indikator kinerja utama mampu tercapai 100 persen meskipun realisasi anggaran tidak sepenuhnya terserap, yakni hanya berkisar antara 78 hingga 90 persen dari pagu yang tersedia. Indeks Perencanaan Pembangunan tercapai penuh dengan serapan anggaran 90,04 persen, komponen perencanaan kinerja pada penilaian SAKIP Provinsi juga terpenuhi dengan realisasi 87,12 persen, sementara komponen pengukuran kinerja pada penilaian SAKIP Provinsi tetap optimal meskipun serapan anggaran hanya 78,22 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa setiap program dan kegiatan telah dijalankan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dengan demikian, prinsip efektivitas dan efisiensi dapat diwujudkan, sehingga kinerja pembangunan daerah tetap terjaga secara optimal. Untuk memperkuat gambaran capaian kinerja secara lebih rinci, berikut disajikan realisasi kinerja dan anggaran BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2024 berdasarkan program, kegiatan, serta sub kegiatan yang dilaksanakan:

Tabel 3.19 Realisasi Kinerja dan Anggaran BAPPEDA Tahun 2024

No	IKU Prog/Keg S.Keg	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian %	Pagu	Realisasi (Rp.)	%
1	INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN	82	93,94	114,00%	5.188.388.600	4.481.537.161	90,04%
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			100,00%	5.188.388.600	4.481.537.161	90,04%
3	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100	100	100,00%	1.854.852.600	1.699.842.266	94,69%
4	Pelaksanaan Konsultasi Publik	1	1	100,00%	84.054.000	83.474.400	99,31%
5	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	2	2	100,00%	555.292.200	529.306.550	95,32%
6	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	6	6	100,00%	1.215.506.400	1.087.061.316	89,43%
7	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100	100	100,00%	1.472.751.400	1.413.690.333	97,79%
8	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3	3	100,00%	200.000.000	197.355.200	98,68%
9	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	80	80	100,00%	305.598.200	305.538.940	99,98%
10	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	60	60	100,00%	78.626.800	77.614.700	98,71%
11	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	3	3	100,00%	888.526.400	833.181.493	93,77%
12	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100	100	100,00%	1.551.152.600	1.082.646.108	74,42%
13	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	2	2	100,00%	194.262.200	140.387.545	72,27%

14	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	3	3	100,00%	900.200.000	512.822.869	56,97%
15	Fasilitasi/ Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	3	3	100,00%	456.690.400	429.435.694	94,03%
16	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	100	100	100,00%	309.632.000	285.358.454	93,26%
17	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1	1	100,00%	125.000.000	122.346.340	97,88%
18	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1	1	100,00%	119.528.000	97.913.279	81,92%
19	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	1	1	100,00%	65.104.000	65.098.835	99,99%
20	NILAI KOMPONEN PERENCANAAN KINERJA PADA PENILAIAN SAKIP PROVINSI	22,45	21,93	97,60%	5.174.652.800	4.564.475.557	87,12%
21	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			100,00%	5.174.652.800	4.564.475.557	87,12%
22	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	100	100,00%	1.637.768.300	1.627.704.943	99,55%
23	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	1	100,00%	153.615.200	153.153.179	99,70%
24	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	10	10	100,00%	75.538.800	75.271.000	99,65%
25	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1	1	100,00%	257.465.500	256.914.900	99,79%
26	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	1	100,00%	540.704.200	538.803.664	99,65%

27	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6	6	100,00%	133.186.800	133.086.900	99,92%
28	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2	2	100,00%	477.257.800	470.475.300	98,58%
29	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100	100	100,00%	1.792.996.400	1.458.195.944	77,23%
30	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	1	100,00%	426.521.400	391.080.650	91,69%
31	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5	5	100,00%	287.003.800	271.110.764	94,46%
32	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1	1	100,00%	378.494.000	320.142.600	84,58%
33	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	1	100,00%	374.796.400	282.706.658	75,43%
34	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4	4	100,00%	207.038.000	125.942.356	60,83%
35	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1	1	100,00%	119.142.800	67.212.916	56,41%
36	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	100	100,00%	1.743.888.100	1.478.574.670	84,58%
37	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	1	100,00%	328.754.000	277.879.500	84,53%
38	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4	4	100,00%	307.994.000	219.386.430	71,23%
39	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1	1	100,00%	99.962.000	84.628.000	84,66%

40	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	1	1	100,00%	354.815.600	307.180.700	86,57%
41	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5	5	100,00%	154.835.500	139.424.490	90,05%
42	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	2	2	100,00%	497.527.000	450.075.550	90,46%
43	NILAI KOMPONEN PENGUKURAN KINERJA PADA PENILAIAN SAKIP PROVINSI	19,05	18,44	100,00%	1.134.273.700	934.015.089	78,22%
44	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	19,05	18,44	100,00%	1.134.273.700	934.015.089	78,22%
45	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	100	100,00%	555.290.500	552.633.422	99,52%
46	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	10	10	100,00%	219.528.500	218.440.307	99,50%
47	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6	6	100,00%	335.762.000	334.193.115	99,53%
48	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100	100	100,00%	379.779.000	227.780.847	59,02%
49	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5	5	100,00%	211.185.000	142.719.778	67,58%
50	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4	4	100,00%	168.594.000	85.061.069	50,45%
51	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	100	100,00%	199.204.200	153.600.820	76,12%



52	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4	4	100,00%	95.000.000	52.027.000	54,77%
53	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5	5	100,00%	104.204.200	101.573.820	97,48%
54	PERENCANAAN						
55	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			100,00%	26.483.746.400,79	25.047.044.778	90,38%
56	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100,00%	441.338.611	354.479.300	81,57%
57	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	12	100,00%	288.119.811	223.223.700	77,48%
58	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	7	100,00%	153.218.800	131.255.600	85,67%
59	Administrasi Keuangan	100	100	100,00%	20.872.259.240	20.072.239.253	95,53%
60	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	105	105	100,00%	20.765.554.339,79	19.970.995.253	96,17%
61	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD	2	2	100,00%	106.704.900	101.244.000	94,88%
62	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	100,00%	86.447.000	82.434.200	95,36%
63	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	3	100,00%	86.447.000	82.434.200	95,36%
64	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100,00%	461.255.000	404.965.500	89,53%
65	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	479	479	100,00%	186.908.000	184.388.000	98,65%
66	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50	50	100,00%	274.347.000	220.577.500	80,40%
67	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100,00%	1.882.840.300	1.624.293.300	85,82%
68	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	12	100,00%	425.337.000	409.744.000	96,33%
69	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12	12	100,00%	39.124.500	35.855.700	91,65%





70	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	12	100,00%	40.368.000	28.267.300	70,02%
71	Penyediaan Bahan/Material	12	12	100,00%	44.738.400	44.738.400	100,00%
72	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1	100,00%	192.924.000	139.168.000	72,14%
73	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	100,00%	1.140.348.400	966.519.900	84,76%
74	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100,00%	133.573.100	126.150.000	94,44%
75	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17	17	100,00%	133.573.100	126.150.000	94,44%
76	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100,00%	1.901.353.873	1.736.028.624	86,43%
77	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	1	100,00%	350.640.000	302.691.124	86,33%
78	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	1	100,00%	50.646.000	40.579.000	80,12%
79	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	1	100,00%	1.500.067.873	1.392.758.500	92,85%
80	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100,00%	704.679.277	646.454.601	94,40%
81	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	12	100,00%	411.545.000	356.395.601	86,60%
82	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	330	330	100,00%	27.800.000	27.100.000	86,60%
83	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	3	100,00%	265.334.277	262.959.000	86,60%
TOTAL					37.981.061.501	35.027.072.585	

Sumber: Evaluasi Renja, 2024



Pada tahun 2024, kinerja Bappeda Provinsi Lampung menunjukkan hasil yang cukup baik dilihat dari tiga indikator utama. Indeks Perencanaan Pembangunan ditargetkan sebesar 82, namun realisasinya mencapai 93,94 atau 114,00%. Dari sisi anggaran, pagu yang tersedia sebesar Rp5,18 miliar dengan realisasi Rp4,48 miliar atau 90,04%. Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun anggaran tidak terserap penuh, kinerja justru melampaui target sehingga penggunaan anggaran dapat dinilai sangat efisien.

Selanjutnya, Nilai Komponen Perencanaan pada Penilaian SAKIP Provinsi ditargetkan sebesar 22,45 dengan capaian 21,93 atau 97,60%. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp5,17 miliar terealisasi Rp4,56 miliar atau 87,12%. Walaupun capaian kinerja belum sepenuhnya 100%, pencapaian yang sangat mendekati target ini menunjukkan efektivitas program yang dilaksanakan. Hal ini juga menjadi peluang perbaikan di masa mendatang agar nilai perencanaan dapat terus ditingkatkan, sementara penggunaan anggaran tetap efisien dan berdampak signifikan.

Lalu Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP Provinsi ditetapkan target 19,05 dan berhasil direalisasikan sebesar 18,44 dengan tingkat capaian 100,00%. Pagu anggaran sebesar Rp1,13 miliar direalisasikan Rp934 juta atau 78,22%. Capaian dengan serapan anggaran yang lebih rendah ini menegaskan bahwa pengelolaan keuangan berjalan sangat efisien, di mana anggaran yang lebih hemat mampu menghasilkan kinerja sesuai dengan target.

Secara keseluruhan, hasil ini memperlihatkan bahwa meskipun serapan anggaran rata-rata berada di bawah 100%, efektivitas pelaksanaan program tetap terjaga bahkan beberapa capaian melebihi target yang ditetapkan. Dengan demikian, efisiensi dan efektivitas dapat berjalan seimbang: anggaran digunakan secara hemat tanpa mengurangi kualitas

output, sekaligus membuka ruang peningkatan kualitas kinerja di masa yang akan datang.

3.6 Refokusing Anggaran

Dalam Pelaksanaan APBD Tahun 2024, Bappeda telah melakukan efisiensi anggaran pada Perubahan APBD Tahun 2024. Adapun efisiensi anggaran dilakukan pada pada sub kegiatan berikut ini:

Tabel 3.20 Refokusing Anggaran Sub Kegiatan BAPPEDA

IKU PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)
1	2	3	(4=3-2)
INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN	5.502.058.600	5.188.388.600	-313.670.000
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.502.058.600	5.188.388.600	-313.670.000
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2.041.349.000	1.854.852.600	-186.496.400
Pelaksanaan Konsultasi Publik	186.157.000	84.054.000	-102.103.000
Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	933.148.000	555.292.200	-377.855.800
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	922.044.000	1.215.506.400	293.462.400
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.495.514.400	1.472.751.400	-22.763.000
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	200.000.000	200.000.000	0
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	388.585.200	305.598.200	-82.987.000
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	156.414.800	78.626.800	-77.788.000
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	750.514.400	888.526.400	138.012.000
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.558.576.200	1.551.152.600	-7.423.600
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	202.868.200	194.262.200	-8.606.000



IKU PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)
1	2	3	(4=3-2)
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	741.000.000	900.200.000	159.200.000
Fasilitasi/ Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	614.708.000	456.690.400	-158.017.600
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	406.619.000	309.632.000	-96.987.000
Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	125.000.000	125.000.000	0
Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	171.619.000	119.528.000	-52.091.000
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	110.000.000	65.104.000	-44.896.000
NILAI KOMPONEN PERENCANAAN KINERJA PADA PENILAIAN SAKIP PROVINSI	5.768.911.000	5.174.652.800	-594.258.200
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.768.911.000	5.174.652.800	-594.258.200
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.794.228.300	1.637.768.300	-156.460.000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	383.453.200	153.615.200	-229.838.000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	75.538.800	75.538.800	0
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	257.465.500	257.465.500	0
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	588.476.200	540.704.200	-47.772.000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	133.186.800	133.186.800	0
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	356.107.800	477.257.800	121.150.000





IKU PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)
1	2	3	(4=3-2)
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1.936.309.600	1.792.996.400	-143.313.200
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	491.448.000	426.521.400	-64.926.600
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	354.563.800	287.003.800	-67.560.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	401.771.000	378.494.000	-23.277.000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	362.346.000	374.796.400	12.450.400
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	207.038.000	207.038.000	0
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	119.142.800	119.142.800	0
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	800.000.000	636.748.000	-163.252.000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	480.000.000	328.754.000	-151.246.000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	320.000.000	307.994.000	-12.006.000
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1.238.373.100	1.107.140.100	-131.233.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	115.000.000	99.962.000	-15.038.000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	418.537.600	354.815.600	-63.722.000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	154.835.500	154.835.500	0
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	550.000.000	497.527.000	-52.473.000





IKU PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)
1	2	3	(4=3-2)
NILAI KOMPONEN PENGUKURAN KINERJA PADA PENILAIAN SAKIP PROVINSI	1.083.954.500	1.134.273.700	50.319.200
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.083.954.500	1.134.273.700	50.319.200
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	584.830.500	555.290.500	-29.540.000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	209.748.500	219.528.500	9.780.000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	375.082.000	335.762.000	-39.320.000
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	334.499.800	379.779.000	45.279.200
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	190.009.800	211.185.000	21.175.200
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	144.490.000	168.594.000	24.104.000
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	164.624.200	199.204.200	34.580.000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	70.000.000	95.000.000	25.000.000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	94.624.200	104.204.200	9.580.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	25.895.131.664,50	26.483.746.401	588.614.736
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	361.425.000	441.338.611	79.913.611
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	233.286.200	288.119.811	54.833.611
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	128.138.800	153.218.800	25.080.000
Administrasi Keuangan	20.533.975.365	20.872.259.240	338.283.875
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.444.760.164,50	20.765.554.340	320.794.175





IKU PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)
1	2	3	(4=3-2)
Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD	89.215.200	106.704.900	17.489.700
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	52.331.400	86.447.000	34.115.600
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	52.331.400	86.447.000	34.115.600
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	226.147.000	461.255.000	235.108.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	85.000.000	186.908.000	101.908.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	141.147.000	274.347.000	133.200.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.042.006.500	1.882.840.300	-159.166.200
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	462.703.200	425.337.000	-37.366.200
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	39.124.500	39.124.500	0
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	40.368.000	40.368.000	0
Penyediaan Bahan/Material	44.738.400	44.738.400	0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	192.924.000	192.924.000	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.262.148.400	1.140.348.400	-121.800.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	162.575.600	133.573.100	-29.002.500
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	162.575.600	133.573.100	-29.002.500
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.826.007.600	1.901.353.873	75.346.273
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	350.640.000	350.640.000	0
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.075.000	50.646.000	-14.429.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.410.292.600	1.500.067.873	89.775.273
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	690.663.200	704.679.277	14.016.077
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	452.337.000	411.545.000	-40.792.000





IKU PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)
1	2	3	(4=3-2)
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.800.000	27.800.000	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	210.526.200	265.334.277	54.808.077
Jumlah	38.250.055.764,50	37.981.061.501	-268.994.263
Persentase Refokusing Pagu Murni	99,30%	1,70%	

Sumber: BAPPEDA, 2024

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung berhasil melaksanakan refocusing anggaran sebesar Rp. 268.994.263 atau 1,70%. Dengan adanya penyesuaian ini, pagu perubahan menjadi sebesar Rp. 37.981.061.501 atau 99,30% dari pagu murni sebesar Rp. 38.250.055.764,50

Pada Indeks Perencanaan Pembangunan, terjadi penyesuaian anggaran dari Rp5.502.058.600 menjadi Rp5.188.388.600 atau berkurang sebesar Rp313.670.000. Sementara itu, Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Provinsi juga mengalami rasionalisasi dari Rp5.768.911.000 menjadi Rp5.174.652.800 atau berkurang Rp594.258.200. Lalu, Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP Provinsi justru mengalami penambahan anggaran dari Rp1.083.954.500 menjadi Rp1.134.273.700 atau bertambah Rp50.319.200.

Penyesuaian anggaran ini dilakukan untuk menjaga efektivitas penggunaan dana tanpa mengurangi capaian kinerja, di mana seluruh target sub kegiatan tetap dapat direalisasikan 100%. BAPPEDA tetap menjalankan seluruh program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan strategis yang ada, memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pengendalian, serta evaluasi pembangunan daerah tetap berjalan secara efektif dan efisien.



Keberhasilan ini dicapai melalui berbagai strategi, seperti optimalisasi sumber daya yang tersedia, peningkatan koordinasi antar-perangkat daerah, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan dan pengelolaan data pembangunan. Dengan demikian, Bappeda tetap mampu mencapai kinerja 100% sesuai dengan target yang telah ditentukan, sekaligus mendukung upaya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah.

3.7 Rekomendasi Terhadap Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 Nomor 700/25/IV.01/10/2024. BAPPEDA telah melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang tertuang di LHE tersebut. Adapun tindak lanjut dimaksud dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.21 Tindak Lanjut LHE 2024

No.	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ progres penyelesaian
1.	Perubahan DPA ada dilengkapi dokumen pendukung seperti perubahan renja dan perubahan rencana aksi	BAPPEDA Provinsi Lampung telah menyusun Perubahan Renja dan Rencana Aksi yang disusun setiap tahun nya	2 Dokumen (P Renja, RA)	4 Bulan	BAPPEDA	bit.ly/LHE24-1
2.	Melaksanakan perbaikan/ penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dalam mewujudkan kondisi/ hasil yang lebih baik	Dalam penyusunan dokumen perencanaan, BAPPEDA Provinsi Lampung mempedomani peraturan/ dasar hukum yang berlaku (ter update). Oleh karena itu apabila ada peraturan terbaru, maka dokumen perencanaan akan segera di perbaiki. Sebagai contoh, dengan keluarnya peraturan tentang nomenklatur sub kegiatan yang	2 Peraturan (Kepmendagri 5889 & 1317)	6 Bulan	BAPPEDA	bit.ly/LHE24-2



No.	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ progres penyelesaian
		sebelumnya menggunakan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 yang selanjutnya pada Tahun 2023 di update menggunakan peraturan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5- 1317 Tahun 2023. Maka pada dokumen perencanaan seperti Renstra dan Renja disesuaikan kembali dengan peraturan tersebut.				
3.	Meningkatkan pengendalian intern terhadap mekanisme terhadap pengumpulan data kinerja yang diandalkan	Sebagai data dukung dalam penyusunan dokumen pengendalian (Evaluasi Renja Triwulan), BAPPEDA Provinsi Lampung lebih dahulu menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta Dialog Kinerja/ Peran Hasil yang menjadi dasar dalam menentukan kinerja secara individu	1 Dok (KAK)	1 Bulan	BAPPEDA	bit.ly/LHE24-3
4.	Melakukan pengukuran kinerja konsisten secara berkala	Terkait pengukuran kinerja secara berkala, BAPPEDA Provinsi Lampung telah menyusun dokumen Evaluasi Triwulanan tahun berkenaan. Dimana substansi dalam dokumen tersebut menampilkan capaian kinerja yang dimulai dari capaian Indikator Kinerja Utama sampai dengan capaian pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.	1 Dok (Evaluasi Renja TW)	3 Bulan	BAPPEDA	bit.ly/LHE24-4
5.	Melakukan pengukuran kinerja yang lebih terperinci agar mempengaruhi penyesuaian	Dalam menentukan kebutuhan anggaran, didasari oleh capaian kinerja tahun sebelumnya. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan dokumen Evaluasi Renja, dimana melalui	1 Dokumen (Ev. Renja)	3 Bulan	BAPPEDA	bit.ly/LHE24-5



No.	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ progres penyelesaian
	anggaran dalam mencapai kinerja	dokumen tersebut diketahui hal menjadi hambatan dalam pelaksanaan sub kegiatan.				
6.	Melakukan dokumen laporan kinerja untuk mempublikasikan tepat waktu	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasi oleh BAPPEDA Provinsi Lampung melalui 2 Website, yakni Aplikasi/ Website yang dimiliki Kemen PAN RB (esr.menpan.go.id) sesuai dengan tenggat waktu unggah yang telah ditetapkan oleh Kemenpan RB yaitu selambat- lambatnnya pada tanggal 31 Maret setiap tahunnya dan Website BAPPEDA Provinsi Lampung dilaman www.bappeda.lampungprov.go.id	2 Website (ESR Menpan dan Website Bappeda)	1 Bulan	BAPPEDA	bit.ly/LHE24-6
7.	Melakukan peningkatan koordinasi terhadap pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja agar mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi seperti mengaitkan LKj dengan perencanaan	Basis data dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) adalah dokumen perencanaannya, seperti Renstra, Renja Rencana Aksi, dll. Oleh karena itu Laporan Kinerja merupakan capaian kinerja di masing-masing sub kegiatan yang pencapaian outputnya dilaksanakan pegawai yang ada di BAPPEDA Provinsi Lampung mulai dari tingkat Ess II, III, IV hingga fungsional perencana dan pelaksana.	SKP	12 Bulan	BAPPEDA	bit.ly/LHE24-7
8.	Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilaksanakan secara berjenjang	Evaluasi akuntabilitas kinerja secara berjenjang yang dilakukan lebih dahulu melalui Perjanjian Kinerja yang dimulai dari Ess II, III dan Pejabat Pengawas.	SK Tim Kerja	12 Bulan	BAPPEDA	bit.ly/LHE24-8



No.	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ progres penyelesaian
		Untuk fungsional dan Staf melalui SK Tim Kerja				

Sumber: Olahan Data BAPPEDA, 2024

3.8 Prestasi yang Diraih BAPPEDA Provinsi Lampung di Tahun 2024

1. Prestasi BAPPEDA Provinsi Lampung

Sejalan dengan capaian kinerja dan keuangan dengan raihan kategori “Sangat Tinggi” oleh BAPPEDA Provinsi Lampung di Tahun 2024 sebagai Instansi Pemerintah yang selalu berupaya meningkatkan kinerja di bidang perencanaan, apresiasi dalam bentuk penghargaan terhadap kinerja perencanaan dan pelayanan telah diterima BAPPEDA Provinsi Lampung di Tahun 2023, adapun penghargaan-penghargaan tersebut antara lain :

1. **Indeks Perencanaan Pembangunan** Provinsi Lampung pada tahun 2024 berhasil meraih nilai **93,94** dengan predikat **Sangat Memuaskan** dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Capaian ini menunjukkan konsistensi kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung dalam mengawal kualitas perencanaan pembangunan daerah.



2. Pemerintah Provinsi Lampung melalui BAPPEDA kembali menorehkan prestasi nasional dengan meraih **Bhumandala Rajata (Medali Perak) Tahun 2024** dari Badan Informasi Geospasial (BIG). Penghargaan ini diberikan atas kinerja Provinsi Lampung dalam kategori **Simpul Jaringan Informasi Geospasial**, sebagai wujud dedikasi dalam pemanfaatan teknologi dan data spasial untuk



mendukung tata kelola pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data.

3. **Evaluasi RPJMD 2019-2024** oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri menetapkan total hasil kinerja Provinsi Lampung sebesar **92,16** dengan predikat **Sangat Memuaskan**. Capaian ini terdiri atas aspek kesejahteraan masyarakat (**80,34% - Memuaskan**), aspek daya saing daerah (**90,12% - Sangat Memuaskan**), serta aspek pelayanan umum (**105,74% - Sangat Memuaskan**).
4. BAPPEDA Provinsi Lampung juga sukses mengintegrasikan **Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)** dengan **RPJPD 2025-2045** dengan capaian nilai **100 (Sempurna)**. Hal ini dibuktikan melalui hasil verifikasi Kementerian Dalam Negeri pada 5 Mei 2024, yang menegaskan keseriusan Provinsi Lampung dalam memastikan pembangunan berkelanjutan sesuai prinsip tata kelola lingkungan hidup.
5. Pada tahun 2024, **Nilai SAKIP BAPPEDA Provinsi Lampung meningkat menjadi 83,35** dengan predikat **A (Memuaskan)**. Nilai ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (2023) yang berada pada angka 81,25, mencerminkan peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dalam mendukung efektivitas perencanaan pembangunan.

Sejumlah capaian dan prestasi yang telah diraih BAPPEDA Provinsi Lampung pada tahun 2024 tidak hanya mencerminkan keberhasilan dalam menjalankan fungsi perencanaan, tetapi juga menunjukkan komitmen nyata dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang berkualitas, transparan, dan berkelanjutan.

2. Inovasi BAPPEDA Provinsi Lampung

Bappeda Provinsi Lampung telah mengambil langkah inovatif dalam memperkuat sistem perencanaan dan pengukuran kinerja pembangunan daerah melalui pengembangan aplikasi e-Pengendalian. Kehadiran aplikasi ini

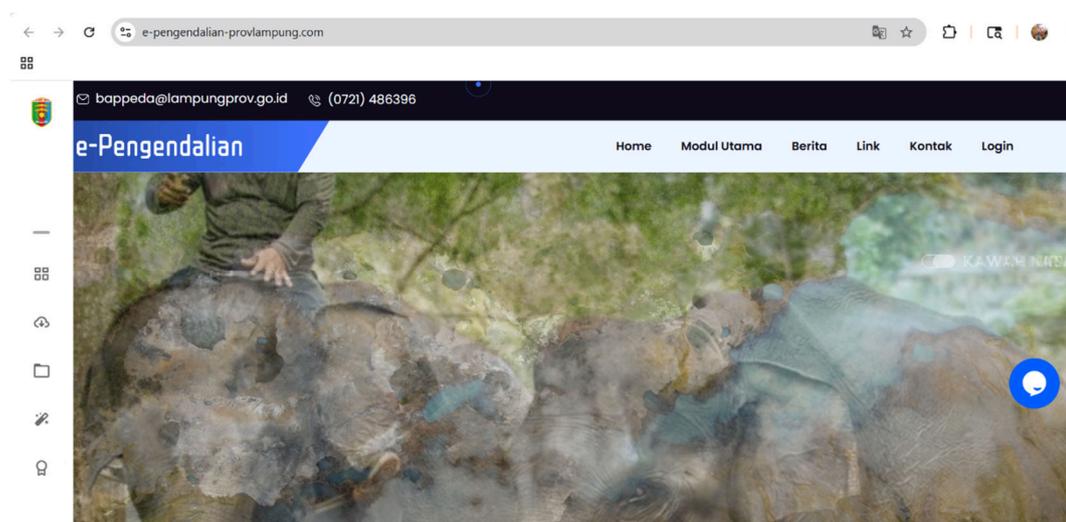
menjadi bukti komitmen Bappeda dalam mendorong tata kelola pembangunan yang lebih terukur, transparan, dan berbasis data. Selama ini, pengendalian pembangunan sering kali menghadapi tantangan berupa keterlambatan pelaporan, kesenjangan data antarperangkat daerah, serta kurangnya integrasi dalam proses evaluasi. Melalui e-Pengendalian, seluruh proses tersebut dapat dikelola secara lebih efektif karena setiap perangkat daerah dapat memasukkan laporan capaian program dan kegiatan secara real time, sehingga memudahkan Bappeda dalam melakukan monitoring sekaligus evaluasi secara menyeluruh.

Tabel 3.22 Daftar Inovasi BAPPEDA Provinsi Lampung

No.	Inovasi	Uraian	Manfaat	Dampak
1	E-Pengendalian	Aplikasi berbasis web yang dirancang BAPPEDA Provinsi Lampung untuk mendukung fungsi perencanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pembangunan daerah. Dibangun melalui tahapan analisis, desain, koding, uji coba, dan implementasi dengan modul-modul terintegrasi. Aplikasi ini mendigitasi data perencanaan pembangunan kabupaten/kota, serta memfasilitasi konsultasi dan evaluasi RPJMD/RKPD.	<ol style="list-style-type: none">1. Memudahkan fasilitasi dokumen perencanaan daerah,2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengendalian kebijakan,3. Memperkuat mekanisme penyalarsan dokumen perencanaan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.	Terciptanya basis data pembangunan daerah yang lengkap, akurat, dan terintegrasi, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Lampung.

Sumber: BAPPEDA, 2024

Inovasi ini tidak hanya mempermudah proses konsolidasi data, tetapi juga meningkatkan akurasi dalam pengukuran kinerja pembangunan. Indikator-indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan, baik RPJMD maupun RKPD, dapat dipantau secara elektronik dan terstandardisasi, sehingga hasilnya lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya sistem ini, Bappeda Provinsi Lampung memiliki alat bantu yang kuat untuk mengidentifikasi hambatan pelaksanaan program sejak dini serta memberikan rekomendasi perbaikan secara cepat dan tepat. Hal ini sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mensyaratkan adanya keterukuran, konsistensi, dan kejelasan dalam setiap tahapan perencanaan maupun pelaksanaan.



Gambar 3.8 Website E-Pengendalian BAPPEDA Provinsi Lampung

Lebih jauh, pemanfaatan e-Pengendalian juga menciptakan ruang transparansi yang lebih luas. Laporan kinerja yang dihasilkan dapat disajikan secara terbuka dan akuntabel, sehingga mendorong partisipasi dan pengawasan dari berbagai pemangku kepentingan. Inovasi ini menempatkan Bappeda Provinsi Lampung pada posisi strategis sebagai motor penggerak reformasi birokrasi di bidang perencanaan, karena tidak hanya berfungsi sebagai penyusun dokumen perencanaan, tetapi juga pengendali utama yang memastikan arah pembangunan tetap berada pada jalurnya.



Dengan demikian, e-Pengendalian bukan sekadar aplikasi, melainkan instrumen transformasi yang mendukung terbangunnya budaya kerja berbasis kinerja. Bappeda Provinsi Lampung melalui inovasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan daerah hanya dapat dicapai apabila pengendalian dan pengukuran kinerja dilakukan secara konsisten, transparan, dan didukung oleh teknologi yang andal.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan keterangan capaian kinerja dan keuangan yang telah diuraikan dalam Bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Capaian Kinerja Indikator Indeks Perencanaan Pembangunan (IPP) yang diraih oleh BAPPEDA dari target sebesar 82, meraih capaian 93,94 dengan predikat "SANGAT MEMUASKAN" pada Tahun 2024. Persentase capaian kinerja IPP adalah lebih dari 100% dengan Kategori Kinerja "SANGAT MEMUASKAN". Realisasi Anggaran Indeks Perencanaan Pembangunan tercapai 100% dengan efisiensi anggaran sebesar 9,96% dengan capaian realisasi 90,04%. Dengan pagu Rp5,18 miliar dan realisasi Rp4,48 miliar (90,04%), capaian ini menunjukkan efektivitas perencanaan pembangunan yang cukup baik. Target kinerja Indeks Perencanaan Pembangunan tahun 2024 sebesar 82 dapat terlampaui dengan realisasi 93,94 atau 114%. Dari sisi anggaran, pagu sebesar Rp5,18 miliar terealisasi Rp4,48 miliar atau 90,04%. Hal ini menunjukkan efektivitas kinerja yang tinggi dengan dukungan penggunaan anggaran yang cukup efisien.
- Capaian Kinerja Indikator Nilai Komponen Perencanaan pada Penilaian SAKIP Provinsi Lampung dengan target sebesar 22,45 dari angka maksimal 30, realisasinya sebesar 21,93 atau dengan persentase 97,6% dengan Kategori Kinerja "SANGAT MEMUASKAN". Realisasi Anggaran Komponen Perencanaan Kinerja pada SAKIP Provinsi tercapai 100% dengan efisiensi anggaran sebesar 12,88% dengan capaian realisasi 87,12%. Dari alokasi Rp5,17 miliar terealisasi Rp4,56 miliar (87,12%). Angka ini mencerminkan perencanaan yang akuntabel meskipun belum maksimal. Nilai komponen perencanaan ditargetkan 22,45 dengan realisasi 21,93 atau 97,60%. Anggaran sebesar Rp5,17 miliar terealisasi Rp4,56 miliar atau 87,12%. Meskipun capaian kinerja hampir mendekati

target penuh, efisiensi penggunaan anggaran tetap terjaga sehingga mendukung peningkatan kualitas perencanaan dalam SAKIP.

- Capaian Kinerja Indikator Nilai Komponen Pengukuran pada Penilaian SAKIP Provinsi Lampung dengan target realisasinya sebesar 19,05 dari angka maksimal 30, realisasinya sebesar 18,44 atau dengan persentase 97,6% dengan Kategori Kinerja "SANGAT MEMUASKAN". Realisasi Anggaran Komponen Pengukuran Kinerja pada SAKIP Provinsi tercapai 100% dengan efisiensi anggaran sebesar 21,78% dengan capaian 78,22%. Dengan pagu Rp1,13 miliar, realisasi Rp934 juta (76,60%). Capaian ini masih perlu diperkuat untuk memastikan pengukuran kinerja lebih optimal. Komponen pengukuran ditargetkan 19,05 dengan realisasi 18,44 atau 96,70%. Anggaran yang dialokasikan Rp1,13 miliar terealisasi Rp934 juta atau 78,22%. Meskipun capaian kinerja mendekati target, masih diperlukan penguatan dalam efektivitas pengelolaan anggaran untuk mendukung kualitas instrumen pengukuran kinerja.
- Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, alokasi Rp26,48 miliar dengan realisasi Rp25,04 miliar (90,38%) untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dari total Rp37,98 miliar, realisasi mencapai Rp35,02 miliar (92,22%), menunjukkan pengelolaan anggaran yang cukup efisien dan akuntabel. Program penunjang memperoleh alokasi Rp26,48 miliar dengan realisasi Rp25,04 miliar atau 90,38%. Anggaran ini berperan penting dalam memastikan kelancaran fungsi penunjang dan dukungan operasional, sehingga program berjalan efektif sesuai kebutuhan organisasi.
- Capaian Kinerja Keuangan dari Pagu Perubahan APBD BAPPEDA sebesar Rp. 37.981.061.501 dengan realisasi Rp. 35.207.072.585, persentase capaian kinerja keuangan sebesar 92,22% dengan Kategori Kinerja "SANGAT TINGGI" dan capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan 100%. dengan Kategori Kinerja "SANGAT MEMUASKAN". Secara keseluruhan, total pagu Rp37,98 miliar dengan realisasi Rp35,02 miliar atau 92,22%. Tingkat capaian kinerja rata-rata di atas 95%



memperlihatkan bahwa Bappeda mampu menjaga keseimbangan antara pencapaian target kinerja dan efisiensi penggunaan anggaran.

4.2 Rekomendasi Berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2023

1. Upaya peningkatan kinerja Indeks Perencanaan masih dapat ditingkatkan dengan pengoptimalan pada komponen-komponen keselarasan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD yang mendukung prioritas pembangunan dalam RKP.
2. Penyusunan *Logical Framework* belum berdasarkan CSF (kondisi antara yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi) serta diperlukan pemetaan *leveling* kinerja yang sesuai berdasarkan hasil pemetaan CSF tersebut. Akan dilakukan juga pengawalan Indikator Kinerja Utama yang diakomodir dalam aplikasi SIMONEV.
3. Instrumen-instrumen yang menjadi pengukuran yaitu aplikasi SIMONEV dan E-SAKIP perlu perbaikan lebih lanjut dalam hal menyajikan fitur yang dapat mengakomodir gambaran kinerja perangkat daerah dan pemerintah provinsi
4. Pengukuran kinerja dilaksanakan secara berkala pada setiap triwulan. Dengan demikian pengelola kegiatan diharapkan dapat merancang rencana capaian target secara triwulanan;
5. gDalam rangka mendukung kelancaran operasional pelaksanaan kegiatan, pengelola kegiatan juga diminta untuk dapat menyampaikan berkas laporan administrasi penatausahaan keuangan secara disiplin (lengkap, akurat dan tepat waktu);
6. Untuk mendukung pencapaian target BAPPEDA di tahun berikutnya, perlu dilakukannya rapat/sosialisasi terkait penyusunan rencana kerja dan target kinerja di BAPPEDA yang dihadiri pejabat struktural, pejabat fungsional, dan staf di lingkup BAPPEDA. Hal ini dilakukan

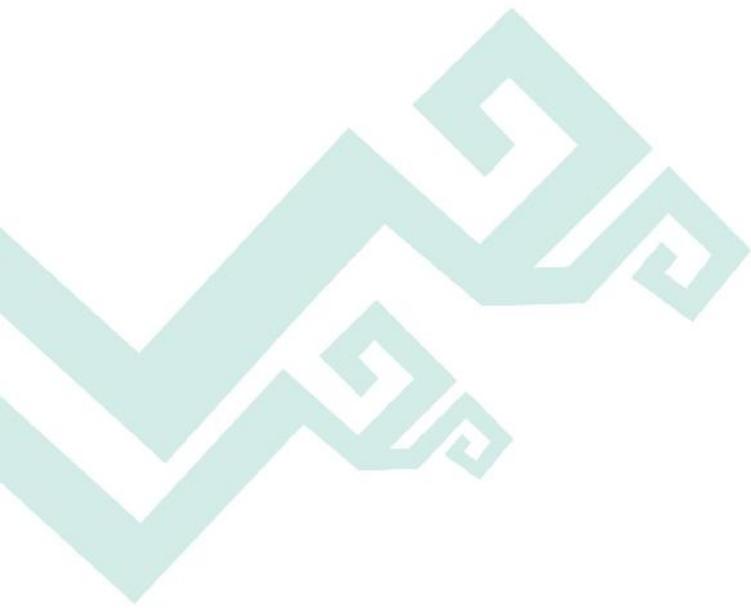




untuk meningkatkan kerjasama antar pimpinan dan pegawai dalam menyelesaikan target yang telah ditetapkan.

Demikian Dokumen Laporan Kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2024 ini dibuat, dengan harapan dapat menjadi bahan rujukan yang bermanfaat, guna peningkatan BAPPEDA Provinsi Lampung maupun untuk pertimbangan perumusan kebijakan dan program yang lebih terarah dan terpadu pada tahun anggaran yang akan datang.





BAPPEDA
PROVINSI LAMPUNG

Jalan Robert Wolter Monginsidi No. 223, Tanjungkarang Pusat,
Pengajaran, Kec. Tlk. Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35119